

**COMMUNITY-BASED TOURISM (CBT) DALAM PENGELOLAAN
PARIWISATA PANTAI SERUNI DI KABUPATEN BANTAENG**

Disusun dan Diusulkan Oleh :

ANDI ARHINSA NUHUNG. M

Nomor Induk Mahasiswa : 10564 11062 16



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2021

**COMMUNITY-BASED TOURISM (CBT) DALAM PENGELOLAAN
PARIWISATA PANTAI SERUNI DI KABUPATEN BANTAENG**

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar

Sarjana Ilmu Pemerintahan

Disusun Dan Diusulkan Oleh :

ANDI ARHINSA NUHUNG, M

Nomor Induk Mahasiswa : 10564 11062 16

Kepada

03/09/2021

1 exp
Smb. Alumni

R/0092/IPM/2100
NUH
c'

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2021

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : *Community-Based Tourism* (CBT) dalam Pengelolaan Pariwisata Pantai Seruni di Kabupaten Bantaeng.

Nama Mahasiswa : Andi Arhinsa Nuhung. M

Nomor Induk Mahasiswa : 10564 11062 16

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II


Dra. Hj. St. Nurmaeta, MM


Hardianto Hawing, ST., M.A

Mengetahui,

Dekan Fisipol

Ketua Program Studi

Unismuh Makassar

Ilmu Pemerintahan


Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si


Dr. Nuryanti Mustari, S.IP., M.Si

HALAMAN PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh Tim Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor: 0199/FSP/A.3-VIII/VIII/43/2021 sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana dalam Program Studi Ilmu Pemerintahan yang dilaksanakan di Makassar pada tanggal 19 Agustus 2021.

TIM PENILAI

Ketua

Sekretaris




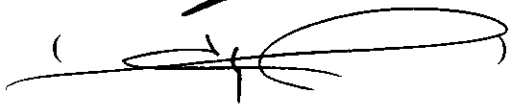

Dr. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si

NBM: 730727


Dr. Burhanuddin, S.Sos, M.Si

NBM: 1084366

PENGUJI

1. Drs. H. Ansyari Mone, M.Pd ()
2. Dra. Hj. St. Nurmaeta, MM ()
3. Dr. Nuryanti Mustari, S.IP.M.Si ()
4. Nasrulhaq, S.Sos.,MPA ()

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Andi Arhinsa Nuhung. M

Nomor Induk Mahasiswa : 10564 11062 16

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis / dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan gelar akademik.

Makassar, 16 Agustus 2021

Yang Menyatakan,


Andi Arhinsa Nuhung. M

ABSTRAK

Andi Arhinsa Nuhung M. 2021. *Community-Based Tourism (CBT)* dalam Pengelolaan Pariwisata Pantai Seruni di Kabupaten Bantaeng. (dibimbing oleh St. Nurmaeta dan Hardianto Hawing).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui *Community-Based Tourism (CBT)* dalam Pengelolaan Pariwisata Pantai Seruni. dilaksanakan di Kabupaten Bantaeng dengan jenis penelitian kualitatif dan tipe penelitian deskriptif. Teknik pengambilan Informan menggunakan *purposive sampling* dengan jumlah 6 (enam) orang dengan pengumpulan data yang digunakan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan tahap reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan wisata pantai seruni dalam perspektif CBT (*Community Based Tourism*) diukur melalui dimensi politik dengan adanya wisata ini masyarakat semakin aktif dan ikut berpartisipasi dalam pengembangan wisata. Kedua, dimensi sosial dengan adanya wisata ini mampu menciptakan kualitas hidup masyarakat lebih baik dari sebelumnya. Ketiga, dimensi budaya pihak pemerintah dan pengelola selalu memberikan ruang kepada masyarakat untuk mempertahankan budayanya. Selain itu memberikan dukungan baik dalam bentuk materi ataupun kebijakan dalam memelihara karakter dan budaya lokal pada kawasan pariwisata pantai Seruni. Keempat, dimensi lingkungan menjamin sustainability lingkungan dengan melibatkan pengelola, pemerintah dan masyarakat tentang prosedur pembangunan yang akan dilakukan sehingga tidak merusak lingkungan fisik dilokasi wisata. Kelima, dimensi ekonomi, dimensi ini yang paling berdampak besar dalam keberadaan pantai Seruni pada kehidupan masyarakat berdampak positif terutama dalam peningkatan pendapatan, memberi peluang pekerjaan, sekaligus sebagai alat untuk mengembangkan usaha dan pada akhirnya mampu merubah taraf/kesejahteraan hidup masyarakat.

Kata Kunci : *Community-Based Tourism*, Pariwisata, Pantai Seruni

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang senantiasa memberi berbagai karunia dan nikmat yang tiada terhingga kepada seluruh makhluknya terutama manusia. Demikian pula salam dan shalawat kepada Nabi kita Muhammad SAW yang merupakan panutan dan contoh kita di akhir zaman. Dengan keyakinan ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Community-Based Tourism (CBT) dalam Pengelolaan Pariwisata Pantai Seruni di Kabupaten Bantaeng”**. Skripsi ini merupakan tugas akhir yang saya ajukan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat Ibu **Dra.Hj.St.Nurmaeta, MM** selaku Pembimbing I dan Bapak **Hardianto Hawing, ST.,M.A** selaku Pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Secara khusus penulis sampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua tercinta dan tersayang Ayahanda **Andi Mamma, S.IP** dan Ibunda **Andi Nurlinda** yang sangat berjasa dalam membesarkan, merawat dan memberikan pendidikan sampai jenjang saat ini, yang tidak pernah bosan untuk mendoakan, menyemangati, memotivasi serta memberikan bantuan moril maupun

materil. Dan tak lupa pula kasih sayang yang tak hentinya beliau berikan kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa juga penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti pendidikan pada program S1 Universitas Muhammadiyah Makassar
2. Ibu Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Ibu Dr. Nuryanti Mustari, S.IP.,M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Seluruh Bapak dan Ibu dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar yang senantiasa meluangkan waktunya untuk memberi ilmu kepada penulis selama menempuh perkuliahan.
5. Pihak Pemerintah Dinas Pariwisata Kabupaten Bantaeng yang telah banyak memberikan informasi dan data yang dibutuhkan selama penelitian berlangsung.
6. Saudara(i)ku anak Ilmu Pemerintahan angkatan 2016 selaku sahabat dan teman seperjuangan dalam meraih cita-cita yang telah banyak memberikan saran, dukungan, motivasi dan selalu setia menemani saya dalam suka maupun duka, serta semua pihak yang telah membantu dan mendukung terselesaikannya skripsi ini.

Dan seluruh rekan serta pihak yang penulis tidak sebutkan namanya satu persatu, penulis ucapkan terima kasih yang tak terhingga atas bantuan dan doanya. Akhirnya dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa skripsi ini sangatlah jauh dari kata sempurna. Dan demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun penulis sangat diharapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Makassar, 16 Agustus 2021

Penulis,

Andi Arhinsa Nuhung. M

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan	ii
Halaman Penerimaan Tim	iii
Pernyataan Keaslian Karya Tulis Ilmiah	iv
Abstrak	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu.....	8
B. Konsep <i>Governance</i>	10
C. Konsep <i>Community-Based Tourism (CBT)</i>	13
D. Konsep Pemberdayaan Masyarakat.....	16
E. Konsep Pariwisata.....	22
F. Kerangka Pikir.....	28
G. Fokus Penelitian.....	29
H. Deskripsi Fokus Penelitian.....	30
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Waktu Dan Lokasi Penelitian.....	31
B. Jenis Dan Tipe Penelitian.....	31
C. Sumber Data.....	31
D. Informan Penelitian.....	32
E. Teknik Pengumpulan Data.....	32
F. Teknik Analisis Data.....	33
G. Keabsahan Data.....	35

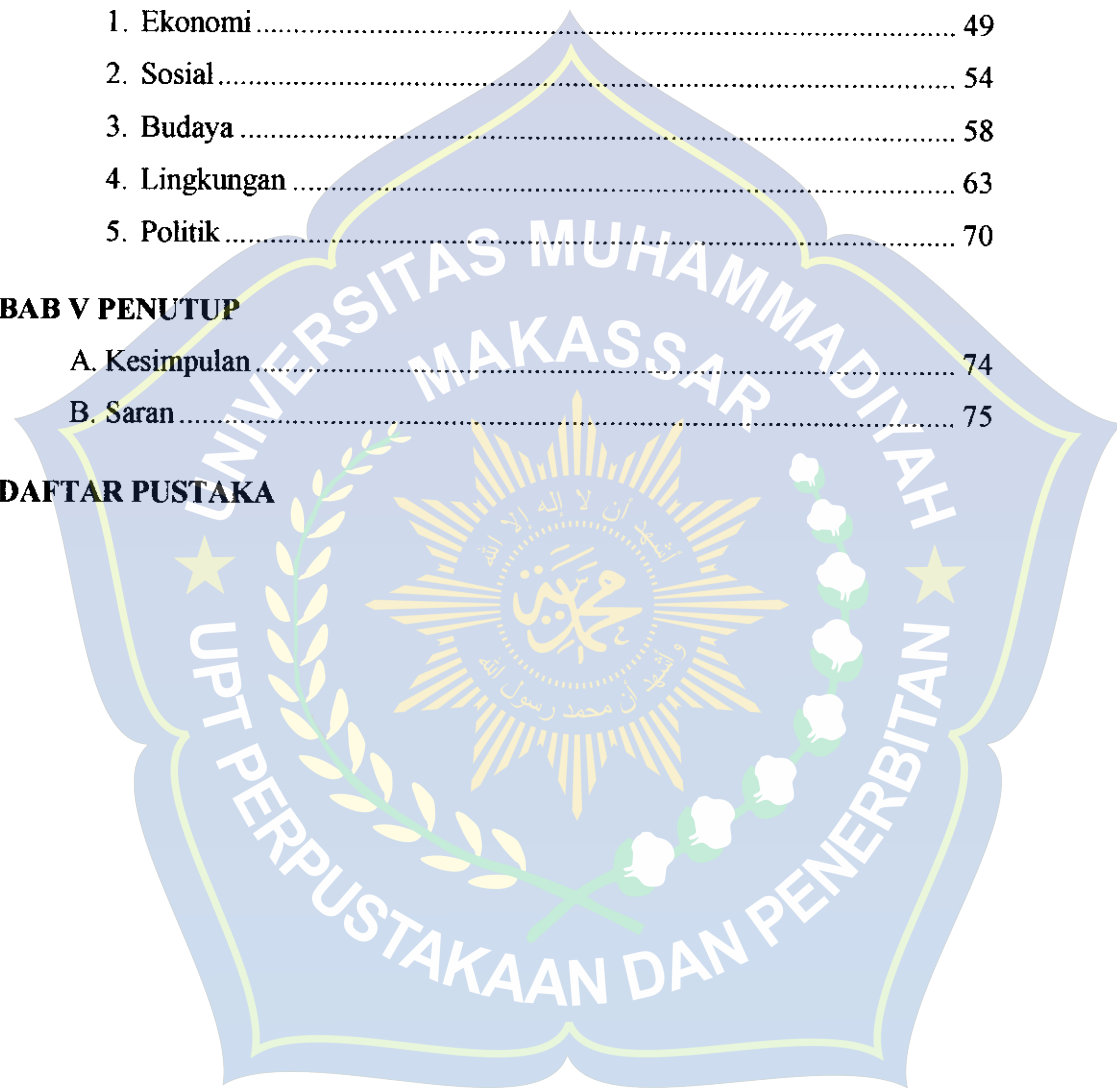
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Fokus Penelitian	37
B. <i>Community-Based Tourism</i> (CBT) dalam Pengelolaan Pariwisata Pantai Seruni di Kabupaten Bantaeng	48
1. Ekonomi	49
2. Sosial	54
3. Budaya	58
4. Lingkungan	63
5. Politik	70

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	74
B. Saran	75

DAFTAR PUSTAKA



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai berbagai ragam kebudayaan dan sumber daya alam yang merupakan modal utama untuk meningkatkan kebutuhan hidup masyarakat. Salah satu kekayaan alam yang dimiliki adalah berbagai macam tempat obyek wisata dengan daya tarik dan ciri khas tersendiri, sehingga ketertarikan para wisatawan baik domestik maupun mancanegara untuk berkunjung ke daerah yang memiliki ciri khas tersendiri. Pariwisata berbasis partisipasi masyarakat sebagai sebuah pendekatan pemberdayaan yang melibatkan masyarakat sebagai pelaku penting dalam konteks paradigma baru. Pembangunan berkelanjutan (sustainable development paradigma) pariwisata berbasis partisipasi masyarakat, merupakan peluang untuk menggerakkan segenap potensi dan dinamika masyarakat, guna mengimbangi peran pelaku usaha pariwisata skala besar.

Munculnya fenomena pengelolaan pariwisata berbasis masyarakat merupakan kritik atas pengelolaan wisata yang dilaksanakan tanpa melibatkan masyarakat dan dipandang kurang mampu memberdayakan masyarakat. Pariwisata berbasis masyarakat (*community based tourism/CBT*) merupakan konsep pengelolaan kepariwisataan dengan mengedepankan partisipasi aktif masyarakat dengan tujuan untuk memberikan kesejahteraan bagi mereka dengan tetap menjaga kualitas lingkungan, serta melindungi kehidupan social dan budayanya. Konsep pariwisata berbasis berbasis masyarakat berkesesuaian

dengan pariwisata berkelanjutan (*sustainable tourism*) yang memerlukan partisipasi masyarakat.

Pariwisata berbasis masyarakat mengedepankan pendekatan *bottom-up*, sedangkan pariwisata berkelanjutan mengedepankan pendekatan *top-down*. Pendekatan *bottom-up* mengandung arti bahwa inisiatif untuk pengembangan pariwisata berasal dari masyarakat, sedangkan pada pendekatan *top-down*, inisiatif berasal dari pemerintah (Baskoro, 2008). Penerapan pariwisata berbasis masyarakat dianggap mampu memberikan berbagai manfaat bagi masyarakat yaitu peningkatan kesejahteraan, perlindungan terhadap lingkungan, serta perlindungan terhadap kehidupan sosial dan budaya mereka.

Pariwisata mengalami kemajuan, karena berkembangnya teknologi komunikasi dan transportasi. Perkembangan pariwisata melalui teknologi komunikasi seperti melalui media sosial bisa membuat objek pariwisata yang biasa saja menjadi objek pariwisata yang sangat luar biasa. Berkembangnya pariwisata di suatu daerah akan mendatangkan banyak manfaat bagi masyarakat, yakni secara ekonomis, sosial, dan budaya. Namun, jika pengembangannya tidak dipersiapkan dan dikelola dengan baik, justru akan menimbulkan berbagai permasalahan yang menyulitkan atau bahkan merugikan masyarakat.

Menurut Dewi (2013) dalam penelitiannya Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Objek Wisata Bahari di Pulau Kapoposang Kabupten Pangkajene dan Kepulauan dengan tujuan berfokus pada partisipasi masyarakat dalam pengembangan objek wisata bahari. Masyarakat hanya dilibatkan sebatas perencanaan sedangkan pada proses pelaksanaan dan pemanfaatan masyarakat

sudah tidak terlibat. Adanya kerjasama dengan pihak swasta ini sebenarnya menjadikan masyarakat Pulau Kapoposang ketergantungan dengan pihak swasta sebagai partner dan kurang mendidik kemandirian bagi masyarakat untuk mengembangkan sendiri pulaunya. Masyarakat dengan kawasan terumbu karang yang indah tidak mampu mengembangkan berbagai kegiatan ekonomi dipulaunya sendiri seperti penyediaan makanan dan minuman, homestay, souvenir, jasa transportasi, pemandu dan perlengkapan wisata bahari”.

Destinasi pariwisata jika dikelola dengan baik, tentu akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Pelaku pariwisata mulai melakukan tindakan pengelolaan maupun pengembangan dengan penelitian dan observasi terhadap obyek-obyek wisata di Indonesia. Langkah tersebut dilakukan guna mengetahui potensi dan permasalahan yang ada pada setiap obyek untuk kemudian mencari solusinya. Langkah lainnya adalah promosi dengan media cetak, elektronik, maupun multimedia agar masyarakat juga mengetahui akan keberadaan obyek-obyek tersebut dan turut berpartisipasi dalam pengembangannya.

Pada pariwisata berkelanjutan partisipasi masyarakat sangatlah penting. *community based tourism* (CBT), konsep ini sendiri merupakan konsep dimana masyarakat merupakan elemen penting pada pariwisata karena masyarakat akan mengelola pariwisata menjadi pariwisata yang berkelanjutan. Spillane (2001) mengemukakan bahwa, aspek lain yang dianggap penting dalam mengembangkan dan mengelola obyek wisata yakni adanya kebijaksanaan ekonomi ialah pembangunan daerah secara regional melalui kegiatan pariwisata, terutama dalam mengalami timbulnya urbanisasi sebagai akibat semakin padatnya penduduk yang

menimbulkan masalah sosial dan ekonomi.

Kabupaten Bantaeng merupakan Kabupaten yang memiliki potensi sumber daya alam yang berlimpah, keanekaragaman hayati dan peninggalan sejarah/budaya. Berlimpahnya sumber daya alam yang ada dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi ketika sumber daya tersebut dapat di kelola dengan baik sesuai dengan apa yang paling diminati masyarakat sehingga pemanfaatan sumber daya alam tersebut tidak akan menghabiskan waktu ataupun materi akibat ketidakberhasilan dalam mengelola suatu sumber daya alam dan sumber daya manusia.

Kabupaten Bantaeng merupakan salah satu destinasi wisata favorit di Sulawesi Selatan. Salah satu titik wisata utamanya adalah Pantai Seruni. Wisata Pantai yang Terletak di Daerah Kabupaten Bantaeng, dan bisa dikatakan sebagai saingan dari Pantai Losari, Makassar. Pantai Seruni menawarkan pemandangan laut dengan pantai yang cukup indah untuk diabadikan bagi pegiat sosial media yang ingin berselfie ria. Pantai ini sangat bersih dan terawat karena setiap hari petugas pembersih selalu mengontrol kebersihan pantai tersebut agar nyaman bagi pengunjung.

Berdasarkan dari hasil tinjauan peneliti di pantai seruni. Awalnya pantai seruni kumuh, tak menarik, bahkan menurut masyarakat setempat menyeramkan.kini pantai seruni menjadi pusat aktivitas warga bantaeng, Meski pantai seruni tak menawarkan rekreasi pantai dan permandian, namun pemandangan laut di pantai seruni begitu indah untuk diabadikan bagi pegiat sosial media yang berselfie ria, setiap sore hari, banyak warga menghabiskan

waktu di pantai seruni. Destinasi yang cocok untuk berburu sunset matahari tenggelam di Kabupaten Bantaeng di Pantai Seruni juga bisa beraktivitas di sore hari seperti Jogging, berkeliling naik motor, ngobrol santai dengan sahabat, bermain-main di pantai dan sambil menunggu sunset tiba.

Pantai Seruni sebagai pusat kegiatan masyarakat. Alun-alun Bantaeng dan rumah sakit kelas internasional RSUD Prof Dr Andi Makkatutu dibangun di pantai seruni, di atas tanah hasil reklamasi. Ada juga restoran yang dibangun di atas laut. Dan pengelola pantai seruni menyediakan berbagai macam fasilitas seperti bangku-bangku taman, berbagai sarana rekreasi anak-anak seperti mengendarai scuter, naik odong-odong keliling, alung-alung, bendi/dokar hias, jungkit, sepeda hias, ayunan, perosotan, panggung utama taman sebagai tempat penyelenggaraan event, helipad, mesjid, lapangan basket, tempat karaokean, dan berbagai macam penjual makanan kaki limadi saat pada malam hari di pantai seruni terdapat pusat kuliner, di sini anda bisa mencicipi aneka makanan khas dari makassar, pohon-pohon yang di hiasi dengan lampu yang makin mempercantik suasana di malam hari di pantai seruni.

Potensi wisata Pantai Seruni tidak hanya berpeluang pada aspek sosial masyarakat saja, tetapi ada sisi sudut pandang lain yang juga dapat menguntungkan yakni pendapatan daerah Kabupaten Bantaeng sendiri yang diantaranya dapat memberikan sumbangan terhadap penerimaan daerah bersumber dari pajak, atau dapat mendatangkan devisa dari para wisatawan lokal maupun mancanegara yang datang berkunjung serta menumbuhkan usaha-usaha ekonomi yang saling merangkai dan menunjang kegiatannya sehingga dapat

meningkatkan pendapatan masyarakat.

Upaya pengelolaan pariwisata Pantai Seruni ini, sejauh mungkin diarahkan agar masyarakat setempat jangan tersisihkan atau sekedar menjadi penonton atau tontonan. Masyarakat setempat harus menjadi bagian dari kegiatan pariwisata dalam arti luas bukan hanya sekedar menjadi objek melainkan juga menjadi subjek. Keterlibatan masyarakat tidak harus terlibat langsung atau masuk kedalam lingkaran kegiatan pariwisata, tetapi bisa berada dalam lingkaran luar yang tersentuh dampak positif kepariwisataan. Pengaruh ganda pariwisata harus mampu menyentuh hajat hidup masyarakat setempat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis sangat tertarik untuk meneliti dan mendeskripsikan masalah pengelolaan pariwisata Pantai Seruni dengan mengambil judul "*Community-Based Tourism (CBT) dalam Pengelolaan Pariwisata Pantai Seruni di Kabupaten Bantaeng*".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas yang telah di paparkan, maka permasalahan yang dikaji dalam penelitian yakni : Bagaimana *Community-Based Tourism (CBT)* dalam Pengelolaan Pariwisata Pantai Seruni di Kabupaten Bantaeng?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui *Community-Based Tourism (CBT)* dalam Pengelolaan Pariwisata Pantai Seruni di Kabupaten Bantaeng.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Penelitian yang akan dilakukan ini dapat dijadikan sumbangsi pemikiran ilmiah pengembangan ilmu pemerintahan khususnya pada *Community-Based Tourism* (CBT) dalam Pengelolaan Pariwisata Pantai Seruni

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangan pemikiran serta bahan masukan untuk pelaksanaan bagaimana *Community-Based Tourism* (CBT) dalam Pengelolaan Pariwisata Pantai Seruni Kab.Bantaeng.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang dijadikan acuan atau referensi dalam penelitian ini sebagai pembeda, pendukung serta tambahan untuk menganalisa kajian perbedaan maupun persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu. Adapun penelitian terdahulu yang digunakan sebagai berikut :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Rizkianto & Topowijono (2018) dengan judul “Penerapan konsep community based tourism dalam pengelolaan daya tarik wisata berkelanjutan (Studi pada Desa Wisata Bangun, Kecamatan Munjungan, Kabupaten Trenggalek)”. Hasil penelitian ini menunjukkan pengelolaan daya tarik wisata di Desa Wisata Bangun muncul dari inisiatif masyarakat lokal, masyarakat menyepakati pembentukan lembaga desa wisata, pembuatan program prioritas pengelolaan Air Terjun Wonoasri sebagai daya tarik utama dan munculnya kegiatan usaha masyarakat sebagai dampak dari pengelolaan daya tarik wisata.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Marysya & Amanah (2018) dengan judul “Tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan wisata berbasis potensi desa di Kampung Wisata Situ Gede Bogor”. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sebuah pariwisata dianggap sebuah hal yang menjadi pemicu pengembangan suatu kawasan wisata. Kelurahan Situ Gede merupakan tempat wisata baru yang memaksimalkan partisipasi masyarakat sekitar yang menjadi pengelola kawasan dalam pengembangan kawasan wisata. Berkembangnya

suatu kawasan wisata didukung dari partisipasi masyarakat dalam mengelolanya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapatnya hubungan yang signifikan antara umur, lama menetap dan potensi kawasan wisata dengan tingkat partisipasi.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Rusyidi & Fedryansah (2018) dengan judul “Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat” Hasil penelitian ini menunjukkan adanya model pengembangan pariwisata yang diusulkan dengan menggunakan pendekatan pengembangan masyarakat. Pengembangan pariwisata di kawasan Pantai Rambak dan Pantai Rebo pada dasarnya merupakan potret upaya pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Bangka secara keseluruhan. Kajian ini dilakukan untuk menghasilkan sebuah model alternatif yang dapat diterapkan dalam pengembangan pariwisata di wilayah Kabupaten Bangka. Adapun model pengembangan pariwisata tersebut dapat dilihat dalam beberapa tahapan, antara lain: tahap awal (beginning), tahap pertengahan (middle), dan tahap lanjutan (advanced). Dari ketiga tahapan tersebut, terdapat pergeseran strategi, dari strategi direktif menuju ke strategi non-direktif. Pendekatan direktif merupakan pembentukan budaya pariwisata di masyarakat. Sedangkan pendekatan non-direktif merujuk pada budaya pariwisata yang telah tertanam dalam aktifitas kehidupan masyarakat, serta kesadaran dari masyarakat untuk menjaga keberlangsungan sumber daya alam di sekitarnya. Kedua pendekatan tersebut (direktif dan non-direktif) menekankan pada pelibatan penuh kepada masyarakat dalam proses pengembangan pariwisata.

B. Konsep *Governance*

Governance berangkat dari istilah *government*. *Government* atau pemerintah merupakan istilah yang digunakan pada organisasi atau lembaga yang menyelenggarakan kekuasaan pemerintah pada suatu negara. Konsep *government* ini dapat dikatakan sebagai konsep lama dalam penyelenggaraan pemerintahan karena hanya menekankan pada pemerintah (lembaga/institusi pemerintah) sebagai pengatur dan pelaksana tunggal penyelenggaraan pemerintah. Oleh karena itu muncullah konsep *governance* yang menggantikan konsep *government* dalam aspek maupun kajian pemerintahan. Selanjutnya *governance* berasal dari kata “*govern*” dengan definisi yakni mengambil peran yang lebih besar, yang terdiri dari semua proses, aturan dan lembaga yang memungkinkan pengelolaan dan pengendalian masalah-masalah kolektif masyarakat. Dengan demikian secara luas, *governance* termasuk totalitas dari semua lembaga dan unsur masyarakat, baik pemerintah maupun non-pemerintah (Dwiyanto, 2015).

Untuk lebih jelasnya dalam memahami pergeseran makna antara *government* dan *governance*, Leach dan Percy Smith dalam Hetifah (2009) mengungkapkan perbedaan terkait dua konsep tersebut, bahwa *government* mengandung pengertian politisi dan pemerintah yang mengatur, melakukan sesuatu, memberikan pelayanan dan sementara sisa dari elemen sebuah negara itu bersifat pasif. Sementara *governance* meleburkan makna tersebut, dengan merenggangkan kekakuan antara pemerintah dan yang diperintah (bagian negara yang pasif), sehingga bagian yang pasif tersebut memiliki peranan dan andil dari bagian *government*.

Berdasarkan pembedaan antara konsep *government* dan *governance* diatas, dapat dinyatakan bahwa konsep *government* secara makna atau pengertian lebih mengacu atau mengarah kepada politisi atau lembaga pemerintah. *Government* mengarah kepada lembaga pemerintah atau birokrasi itu sendiri yang bertugas memberikan pelayan kepada masyarakat. Selain itu, pada *government* masyarakat hanya bersikap pasif atau hanya semata-mata sebagai pihak yang menerima pelayanan begitu saja. Berbeda dengan *government*, *governance* disebutkan lebih lunak, dalam artian tidak hanya lembaga pemerintahan/birokrasi yang memiliki peran dalam penyelenggaraan pemerintahan, akan tetapi juga memberikan ruang dan andil dari masyarakat dan pihak lain non-pemerintah.

Sebagai suatu konsep, *governance* memiliki beragam pemaknaan yang diungkapkan oleh beberapa ahli sebagai berikut:

Dwiyanto (2015) menekankan mengenai konsep *governance* adalah keterlibatan aktor-aktor di luar pemerintah yang merespon masalah publik. Praktik *governance* ini, bertujuan dalam rangka menyediakan pelayanan public dengan melibatkan aktor dari unsur masyarakat dan mekanisme pasar.

Menurut Chema dalam Keban (2008), *governance* merupakan suatu sistem nilai, kebijakan, dan kelembagaan dimana urusan-urusan ekonomi, sosial, politik dikelola melalui interaksi masyarakat, pemerintah, dan sektor swasta. Pendapat lebih signifikan dikemukakan oleh Kurniawan (2007) yang menerangkan bahwa konsep *governance* merupakan sebuah proses kebijakan yang dilaksanakan dengan melibatkan pemerintah, sektor *private* (swasta) maupun masyarakat.

Mengacu pada beberapa pendapat-pendapat diatas menunjukkan bahwa *governance* merupakan model pemerintahan yang sangat dinamis. Dengan kata lain, *governance* membuka ruang untuk keterlibatan atau partisipasi sektor lain dalam pemerintahan. Pemerintah bukanlah aktor yang tunggal atau dominan dalam pemerintahan. Selain itu, pendapat tersebut menjelaskan bahwa terjadi pengurangan terhadap otoritas pemerintah terkait dengan urusan publik. Pemaknaan tersebut dapat ditinjau dari suatu kondisi yang terjadi ketika pemerintah dalam penyelenggaraan urusan-urusan publik mengalami permasalahan di luar kemampuannya, sehingga dalam penanganan permasalahan tersebut perlu melibatkan pihak lain yang memiliki kapasitas atau kemampuan lebih dan tentunya dapat membantu pemerintah. kondisi tersebut terjadi karena dipengaruhi oleh keterbatasan kapabilitas pemerintah dalam hal sumberdaya dan finansial.

Rosidi dan Fajriani (2013) memetakan bahwa terdapat 3 aktor yang berpengaruh dalam proses *governance*. Tiga aktor tersebut yakni pemerintah, swasta, dan masyarakat. ketiga aktor tersebut saling berkolaborasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah tidak lagi menjadi aktor tunggal yang memonopoli penyelenggaraan pemerintah. melainkan memerlukan aktor lain karena karena keterbatasan kemampuan pemerintah. Swasta dengan dukungan finansialnya harus mampu membantu pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Swasta dalam hal ini tidak diperbolehkan untuk mengurus kepentingannya sendiri yakni hanya semata-mata mencari keuntungan pribadi.

Selain itu, masyarakat juga harus berperan aktif. Masyarakat dan diberikan ruang. Akan percuma apabila sebenarnya masyarakat memiliki niatan yang kuat untuk terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan, akan tetapi tidak diberikan ruang. Keterlibatan masyarakat ini mampu membuat masyarakat yang mandiri dan meningkatkan kualitas masyarakat ke depannya.

C. Konsep *Community-Based Tourism* (CBT)

Menurut Soerjono Soekanto, istilah *community* dapat diterjemahkan sebagai masyarakat". Istilah yang menunjuk pada warga sebuah desa, sebuah kota, suku, atau suatu bangsa. Apabila anggota sesuatu kelompok baik kelompok besar maupun kecil hidup bersama sedemikian rupa sehingga mereka merasakan bahwa kelompok tersebut memenuhi kepentingan hidup yang utama, kelompok tadi disebut masyarakat setempat (Santosa, 2009).

Menurut Sunaryo (2013) *Community-Based Tourism* atau pariwisata berbasis masyarakat merupakan terlibatnya masyarakat dalam upaya pengembangan pariwisata sehingga masyarakat memperoleh manfaat dari adanya obyek wisata dengan cara pendampingan masyarakat lokal untuk mengembangkan obyek wisata, sedangkan Garron (2001) menyatakan bentuk pariwisata yang memberikan kesempatan kepada masyarakat lokal untuk mengontrol dan terlibat dalam manajemen dan pembangunan pariwisata, masyarakat yang tidak terlibat langsung dalam usaha-usaha pariwisata juga mendapat keuntungan, dan menuntut pemberdayaan secara politis dan demokratis serta distribusi keuntungan kepada komunitas yang kurang beruntung diperdasaan. Menurut Endah (2007) definisi CBT yaitu :

1. Bentuk pariwisata yang memberikan kesempatan pada masyarakat lokal untuk mengontrol dan terlibat dalam manajemen dan pembangunan pariwisata.
2. Masyarakat yang tidak terlibat langsung dalam usaha-usaha pariwisata juga mendapatkan keuntungan dari obyek wisata tersebut?
3. Pemberdayaan secara politis dan demokratis serta distribusi keuntungan kepada kelompok yang kurang beruntung di pedesaan.

Menurut Endah (2007) definisi CBT yaitu bentuk pariwisata yang memberikan kesempatan pada masyarakat lokal untuk mengontrol dan terlibat dalam manajemen dan pembangunan pariwisata, masyarakat yang tidak terlibat langsung dalam usaha-usaha pariwisata juga mendapatkan keuntungan dari obyek wisata tersebut, dan menuntut pemberdayaan secara politis dan demokratis serta distribusi keuntungan pada kelompok yang kurang beruntung di pedesaan.

Ciri-ciri khusus dari CBT menurut Murphy (2013) yakni menekankan strategi yang pada identifikasi tujuan masyarakat serta keinginan dan kemampuan mereka dalam menerima manfaat pariwisata sehingga setiap masyarakat harus didorong untuk mengidentifikasi tujuannya sendiri dan mengarahkan pariwisata untuk meningkatkan kebutuhan masyarakat lokal. Untuk itu dibutuhkan perencanaan sedemikian rupa sehingga aspek sosial dan lingkungan masuk dalam perencanaan dan industri pariwisata memperhatikan wisatawan dan juga masyarakat setempat. Timothy (1999) mengungkapkan ciri-ciri khusus CBT berkaitan dengan manfaat yang diperoleh dan adanya upaya perencanaan pendampingan yang membela masyarakat lokal serta kelompok lain memiliki ketertarikan atau minat, yang memberi kontrol lebih besar dalam proses sosial

untuk mewujudkan kesejahteraan.

Berdasarkan pengertian di atas konsep *Community-Based Tourism* adalah konsep yang menjadikan masyarakat adalah elemen terpenting dalam pengembangan pariwisata dimana partisipasi pada setiap masyarakat bahkan kelompok bekerjasama dengan *stakeholder* dapat menjadikan pariwisata yang di daerahnya menjadi pariwisata yang berbasis berkelanjutan.

Suansri (2003) mengungkapkan beberapa point-point aspek utama pengembangan CBT terdapat dimensi, yaitu:

- a. Dimensi ekonomi, dengan indikator berupa adanya dana untuk pengembangan komunitas, terciptanya lapangan pekerjaan di sektor pariwisata, timbulnya pendapatan masyarakat lokal dari sektor pariwisata.
- b. Dimensi sosial dengan indikator meningkatnya kualitas hidup, peningkatan kebanggaan komunitas, pembagian peran yang adil antara laki-laki perempuan, generasi muda dan tua, membangun penguatan organisasi komunitas.
- c. Dimensi budaya dengan indikator berupa mendorong masyarakat untuk menghormati budaya yang berbeda, membantu berkembangnya pertukaran budaya, budaya pembangunan melekat erat dalam udaya lokal.
- d. Dimensi lingkungan, dengan indikator mempelajari *carryng capacity area*, mengatur pembuangan sampah, meningkatkan kepedulian akan perlunya konservasi.
- e. Dimesi politik, dengan indikator meningkatkan partisipasi dari penduduk lokal, peningkatan kekuasaan komunitas yang lebih luas, menjamin hak-hak dalam pengelolaan SDA.

Community-Based Tourism di tunjukkan sebagai alat pengembangan komunitas serta konservasi lingkungan, oleh karena itu tujuan tersebut harus dilihat secara menyeluruh mengenai aspek yang memberikan dampak pada komunitas seperti aspek sosial, budaya, ekonomi, lingkungan, dan politik (Dhimas, 2018). Menurut Sunaryo dalam Dhimas (2018) pengembangan *Community-Based Tourism* membutuhkan partisipasi masyarakat yang baik, dalam konsep pariwisata berbasis masyarakat, masyarakat harusnya diajari untuk mengelola destinasi pariwisata sehingga tercapai pariwisata yang berkelanjutan. Dari penjelasan diatas, alat pengukuran *Community-Based Tourism* (CBT) terdiri dari ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, dan politik.

D. Konsep Pemberdayaan Masyarakat

Friedmann dalam Wrihatnolo dan Riant (2007) menyatakan bahwa konsep pemberdayaan muncul sebagai konsep alternatif pembangunan yang pada intinya menekankan otonomi pengambilan keputusan dari suatu kelompok masyarakat yang berlandaskan sumber daya pribadi, partisipatif, demokratis, dan pembelajaran sosial melalui pengalaman langsung. Konsep pemberdayaan sekaligus mengandung konteks pemihakan kepada lapisan masyarakat yang berada di lapisan paling bawah. (Mubyarto, dalam Wrihatnolo, dan Riant, 2007).

Adapun pengertian pemberdayaan menurut Suharto dalam bukunya *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, sebagai berikut: “Pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan

kelompok lemah. Sebagai tujuan, pemberdayaan adalah menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial". (Suharto, 2010).

Menurut Usman (2010), pemberdayaan masyarakat adalah sebuah proses dalam bingkai usaha memperkuat apa yang lazim disebut Community self-reliance atau kemandirian. Dalam proses ini masyarakat didampangi untuk membuat analisis masalah yang dihadapi, dibantu untuk menemukan alternatif masalah tersebut, serta diperlihatkan strategi memanfaatkan berbagai resources yang dimiliki dan dikuasai. Dalam proses itu masyarakat dibantu bagaimana merancang sebuah kegiatan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki, bagaimana mengimplementasikan rencana tersebut, serta bagaimana membangun strategi memperoleh sumber-sumber eksternal yang dibutuhkan sehingga memperoleh hasil optimal.

Paradigma pemberdayaan masyarakat yang mengemuka sebagai isu sentral dewasa ini muncul sebagai tanggapan atas kenyataan adanya kesenjangan yang belum tuntas terpecahkan terutama antara masyarakat di perdesaan, kawasan terpencil, dan terbelakang. Pemberdayaan pada dasarnya menempatkan masyarakat sebagai pusat perhatian dan sekaligus pelaku utama pembangunan. Paradigma pemberdayaan adalah pembangunan yang berpusat pada rakyat dan merupakan proses pembangunan yang mendorong prakarsa masyarakat yang berakar dari bawah. (Alfitri, 2011).

Pemberdayaan tidak hanya menumbuhkan dan mengembangkan nilai tambah ekonomi, tetapi juga nilai tambah sosial dan nilai tambah budaya. Artinya, pemberdayaan adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum

nilai-nilai sosial. Craig dan Mayo dalam Alfitri (2011) mengatakan bahwa konsep pemberdayaan termasuk dalam pengembangan masyarakat dan terkait dengan konsep: kemandirian (*self help*), partisipasi (*participation*), jaringan kerja (*networking*), dan pemerataan (*equity*).

Pengertian konvensional (Wrihatnolo, dan Riant, 2007) konsep pemberdayaan yakni sebagai terjemahan *empowerment* yang mengandung arti: (1) *to give power or authority to* atau memberikan kekuasaan, mengalihkan kekuatan, atau mendelegasikan otoritas ke pihak lain; (2) *to give ability to* atau usaha untuk memberi kemampuan atau keberdayaan. Pengertian tersebut secara eksplisit menerangkan bagaimana menciptakan peluang untuk mengaktualisasikan keberdayaan seseorang.

Dubois dan Miley (Wrihatnolo, dan Riant, 2007) menjelaskan bahwa dasar-dasar pemberdayaan antara lain meliputi:

1. Proses kerjasama antara klien dan pelaksana kerja secara bersama-sama;
2. Memandang sistem klien sebagai komponen dan kemampuan yang memberikan jalan ke sumber penghasilan dan memberikan kesempatan;
3. Klien harus merasa sebagai agen bebas yang dapat memengaruhi;
4. Kompetensi diperoleh atau diperbaiki melalui pengalaman hidup;
5. Meliputi jalan ke sumber-sumber penghasilan dan kapasitas, untuk menggunakannya secara efektif;
6. Sinergis, dinamis, evolusioner, dan memiliki banyak solusi;
7. Pencapaian melalui struktur-struktur paralel dari perseorangan dan perkembangan masyarakat.

Secara konseptual, pemberdayaan harus memenuhi enam hal berikut:

- a. *Learning by doing*. Pemberdayaan adalah proses belajar, dan terdapat tindakan konkrit yang kontinyu dan dampaknya apat terlihat.
- b. *Problem solving*. Pemberdayaan harus memberikan pemecahan masalah krusial pada waktu yang tepat.
- c. *Self evaluation*. Pemberdayaan harus mampu mendorong masyarakat melakukan evaluasi secara mandiri.
- d. *Self development and coordination*. Pemberdayaan agar mendorong pengembangan diri dan melakukan koordinasi dengan pihak lain secara luas.
- e. *Self selection*. Pemberdayaan menumbuhkan kemandirian dalam menetapkan langkah kedepan.
- f. *Self decisim*. Pemberdayaan membuka kesadaran untuk memilih tindakan yang tepat dengan percaya diri dalam memutuskan sesuatu secara mandiri. (Saraswati, dalam Alfitri, 2011).

Proses pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan dengan:

- 1) Pemungkinan. Menciptakan suasana yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal.
- 2) Penguatan. Memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhannya.
- 3) Perlindungan. Melindungi masyarakat, terutama masyarakat lemah, agar tidak dieksploitasi oleh kelompok masyarakat yang kuat.
- 4) Penyokongan. Memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu menjalankan peranan dan tugas kehidupannya.

5) Pemeliharaan. Menjamin keselarasan dan keseimbangan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan berusaha. (Alfitri, 2011).

Azis dalam Alfitri (2011) memberikan panduan tahapan pemberdayaan sebagai berikut, *pertama*, membantu masyarakat menemukan masalahnya; *kedua*, melakukan analisis masalah tersebut secara mandiri; *ketiga*, menentukan skala prioritas masalah; *keempat*, mencari solusi atas masalah; *kelima*, implementasi penyelesaian masalah; *keenam*, evaluasi.

Pemberdayaan sebagai suatu perubahan yang terencana, dirinci oleh Lippit dalam Mardikanto dan Riant (2012) kedalam tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a) **Penyadaran.** Yakni kegiatan untuk menyadarkan masyarakat tentang eksistensinya tidak hanya sebagai individu dan anggota masyarakat, namun juga dalam kapasitas dalam lingkungan sosial, budaya, dan ekonomi.
- b) **Menunjukkan adanya masalah.** Yaitu menunjukkan masalah terutama menyangkut kelemahan dan kekuatan yang dimiliki.
- c) **Membantu pemecahan masalah.** Melakukan analisis akar masalah, alternatif solusi, serta pilihan alternatif paling mungkin.
- d) **Menunjukkan pentingnya perubahan.** Perubahan sebagai sebuah keniscayaan universal harus diantisipasi secara terencana.
- e) **Melakukan pengujian dan demonstrasi.** Kegiatan ini dilakukan untuk mengetahui aktifitas pemberdayaan paling bermanfaat yang beresiko terkecil.
- f) **Memproduksi dan publikasi informasi.** Penggunaan teknologi informasi diperlukan sekali untuk menyesuaikan dengan karakteristik penerima manfaat penyuluhannya.

g) Melaksanakan pemberdayaan/penguatan kapasitas. Yaitu pemberian kesempatan kepada masyarakat lapisan terbawah untuk bersuara menentukan pilihan-pilihannya.

Menurut Wrihatnolo dan Riant (2007), beberapa alasan mengapa usaha pemberdayaan perlu dilakukan adalah, *pertama*, demokratisasi proses pembangunan. Konsep pemberdayaan memberikan peluang sebesar-besarnya kepada lapisan masyarakat paling bawah untuk terlibat dalam pengalokasian sumber daya pembangunan. Pembangunan digerakkan oleh masyarakat sekaligus menjadi wahana pembelajaran pencerdasan bagi rakyat untuk mengenali kebutuhannya sendiri serta melaksanakan dan melestarikan upaya untuk memenuhi kebutuhannya itu. Penerapan konsep pemberdayaan dengan demikian memberikan efek positif dalam penyelenggaraan ketatanegaraan secara baik. *Kedua*, penguatan peran organisasi kemasyarakatan lokal. Konsep pemberdayaan melibatkan organisasi kemasyarakatan lokal agar berfungsi dalam pembangunan. Organisasi tersebut diasumsikan paling memahami karakteristik lokal masyarakat setempat sehingga peranannya harus diorganisir secara hierarkhis agar informasi tentang situasi terkini dapat dijalin secara multiarah baik vertikal maupun horizontal. *Ketiga*, penguatan modal sosial. Penguatan modal sosial mengandung arti pelebagaan nilai-nilai luhur yang bersifat universal, yakni, kejujuran, kebersamaan, dan kepedulian. Nilai-nilai itulah yang menjadi spirit pemberdayaan. *Keempat*, penguatan kapasitas birokrasi lokal. Konsep pemberdayaan memaksa jajaran pemerintah lokal memberikan perhatian lebih besar kepada rakyat untuk memperoleh dan memenuhi kebutuhan hidupnya,

dalam proses pemberdayaan rakyat pun bertambah cerdas sehingga mampu memaksa penyelenggara layanan publik untuk belajar memahami dan melayani rakyat dengan baik. *Kelima*, mempercepat penanggulangan kemiskinan. Pemberdayaan masyarakat menuntut pemerintah, dan pihak di luar pemerintah untuk memberikan pemihakan dan perlindungan terhadap rakyat miskin sehingga senantiasa teralokasi sumber daya pembangunan untuk rakyat miskin.

E. Konsep Pariwisata

1. Pengertian Pariwisata

Pariwisata adalah semua proses yang ditimbulkan oleh arus perjalanan lalu lintas orang-orang dari luar ke suatu Negara atau daerah dan segala sesuatu yang terkait dengan proses tersebut seperti makan/minum, transportasi, komodasi, dan objek atau hiburan (Simatupang, 2009). Pariwisata merupakan aktivitas, pelayanan dan produk hasil industri pariwisata yang mampu menciptakan pengalaman perjalanan bagi wisatawan (Muljadi, 2012).

Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Undang-undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan Bab I, Pasal 1, ayat 3). Sedangkan definisi Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan Negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah, dan pengusaha (Undang-undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan Bab I, Pasal 1, Ayat 1).

kaitannya dengan jangka panjang, program tindak lanjut serta prioritas sumber daya. Selanjutnya menurut Marpaung (2007) “Perkembangan kepariwisataan bertujuan memberikan keuntungan baik bagi wisatawan maupun warga setempat. Pariwisata dapat memberikan kehidupan yang standar kepada warga setempat melalui keuntungan ekonomi yang didapat dari tujuan wisata. Dalam perkembangan infrastruktur dan fasilitas rekreasi, keduanya menguntungkan wisatawan dan warga setempat, sebaliknya kepariwisataan dikembangkan melalui penyediaan tempat tujuan wisata”.

Hal tersebut dilakukan melalui pemeliharaan kebudayaan, sejarah dan taraf perkembangan ekonomi dan suatu tempat wisata yang masuk dalam pendapatan untuk wisatawan akibatnya akan menjadi pengalaman yang unik daritempat wisata. Pada waktu yang sama, ada nilai-nilai yang membawa serta dalam perkembangan kepariwisataan. Sesuai dengan panduan, maka perkembangan pariwisata dapat memperbesar keuntungan sambil memperkecil masalah-masalah yang ada.

3. Pengelolaan Pariwisata

Pengelolaan atau manajemen berasal dari bahasa Inggris yaitu “management”. Manajemen adalah konsep perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Yahya. 2006). Menurut Leiper dalam Pitana (2009) pengelolaan (manajemen) merujuk kepada seperangkat peranan yang dilakukan oleh seseorang

atau kelompok orang, atau bisa juga merujuk kepada fungsi-fungsi yang melekat pada peran tersebut.

Ahli manajemen mengemukakan sudut pandang yang hamper sama mengenai urutan fungsi manajemen, misalnya fungsi-fungsi manajemen menurut George Terry yang biasa di singkat POAC yaitu Planning (perencanaan), Organizing (pengorganisasian) Actuating (penggerakkan), Controlling (pengawasan). Henri Fayol mengurutkan lima fungsi manajemen yang dikenal dengan singkatan POCCC, yaitu planning (perencanaan), Organizing (pengorganisasian), Commanding (perintah), Cordinating (pengkoordinasian), Controlling (pengawasan). Luther M Guillick mengurutkan enam fungsi manajemen dengan singkatan POSDCORB (Planning, Organizing, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting, dan Budgeting).

Pengelolaan pariwisata haruslah mengacu pada prinsip-prinsip pengelolaan yang menekankan pada nilai-nilai kelestarian lingkungan alam, komunitas, dan nilai sosial yang memungkinkan wisatawan menikmati kegiatan wisatanya serta bermanfaat bagi kesejahteraan komunitas lokal. Menurut Cox dalam Pitana dan Diarta (2009), pengelolaan pariwisata harus memperhatikan prinsip-prinsip berikut :

- a. Pembangunan dan pengembangan pariwisata haruslah didasarkan pada kearifan lokal dan special local sense yang merefleksikan keunikan peninggalan budaya dan keunikan lingkungan.
- b. Preservasi, proteksi, dan peningkatan kualitas sumber daya yang menjadi basis pengembangan kawasan pariwisata.

- c. Pengembangan atraksi wisata tambahan yang mengakar pada khasanah budaya lokal.
- d. Pelayanan kepada wisatawan yang berbasis keunikan dan pengembangan lingkungan lokal.
- e. Memberikan dukungan dan legitimasi pada pembangunan dan pengembangan pariwisata jika terbukti memberikan manfaat positif, tetapi sebaliknya mengendalikan atau menghentikan aktivitas pariwisata tersebut jika melampaui ambang batas (carrying capacity) lingkungan alam atau akseptabilitas sosial walaupun di sisi lain mampu meningkatkan pendapatan masyarakat.

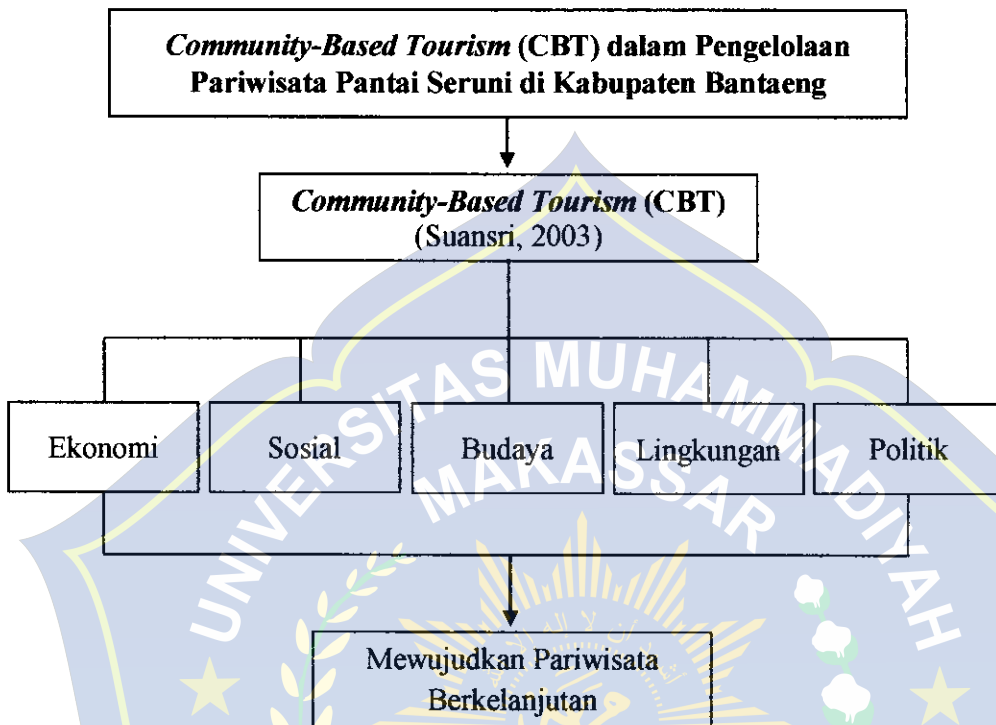
Untuk menyinergikan pengelolaan pariwisata yang memenuhi prinsip-prinsip pengelolaan dalam uraian sebelumnya, diperlukan suatu metode pengelolaan yang menjamin keterlibatan semua aspek dan komponen pariwisata. Metode pengelolaan pariwisata menurut WTO dalam Pitana dan Diarta (2009) mencakup beberapa kegiatan berikut :

- 1) Pengkonsultasian dengan semua pemangku kepentingan
- 2) Pengidentifikasian isu yang mungkin muncul dalam kegiatan pariwisata
- 3) Penyusunan kebijakan
- 4) Pembentukan dan pendanaan agen dengan tugas khusus
- 5) Penyediaan fasilitas dan operasi
- 6) Penyediaan kebijakan fiskal, regulasi, dan lingkungan sosial yang kondusif.

F. Kerangka Pikir

Pariwisata merupakan salah satu sektor dalam meningkatkan perekonomian di Indonesia. Pariwisata merupakan produk, aktivitas, serta pelayanan dari hasil industri pariwisata yang mampu menciptakan pengalaman perjalanan bagi wisatawan. Dalam suatu pariwisata, pada penelitian ini menggunakan Konsep *Community-Based Tourism* (CBT) sebagai konsep pengukuran pengembangan pariwisata berkelanjutan. Peneliti akan mencoba menjelaskan pengaplikasian konsep CBT di pantai Seruni dimana konsep CBT ini masyarakat yakni baik individu dan kelompok masyarakat memiliki kedudukan yang penting dalam mendukung keberhasilan pembangunan pariwisata menuju pariwisata berkelanjutan. Konsep *community based tourism* (CBT) pada pariwisata berkelanjutan menurut Suansri (2003) terdapat lima aspek yakni aspek sosial, ekonomi, budaya, lingkungan, dan politik. *community based tourism* atau pariwisata berbasis masyarakat merupakan terlibatnya masyarakat dalam upaya pengembangan pariwisata sehingga masyarakat memperoleh manfaat dari adanya obyek wisata dengan cara pendampingan masyarakat lokal untuk mengembangkan obyek wisata. Dari aspek yang mempengaruhi menuju pariwisata yang berkelanjutan tersebut akan diteliti sehingga dapat diketahui bagaimana suatu pariwisata menjadi pariwisata menggunakan konsep *Community-Based Tourism* (CBT). Berikut kerangka penelitiannya :

Gambar Bagan Kerangka Pikir:



G. Fokus Penelitian

Pembatasan fokus Penelitian sangat penting dan berkaitan erat dengan masalah maupun data yang dikumpulkan, dimana fokus merupakan pecahan dari masalah. Agar Peneliti dengan mudah dalam pencarian data, maka lebih dahulu ditetapkan fokus penelitian yang dimana fokus penelitaian yaitu bagaimana *Community-Based Tourism (CBT)* dalam Pengelolaan Pariwisata Pantai Seruni di Kabupaten Bantaeng dengan indikator ekonomi, sosial, budaya, lingkungan dan politik.

H. Deskripsi Fokus Penelitian

Adapun deskripsi fokus penelitian yang ingin diteliti adalah sebagai berikut:

1. Dimensi ekonomi, yaitu berupa adanya dana untuk pengembangan komunitas, terciptanya lapangan pekerjaan di sektor pariwisata Pantai Seruni di Kabupaten Bantaeng.
2. Dimensi sosial, yaitu meningkatnya kualitas hidup, peningkatan kebanggaan komunitas, pembagian peran yang adil antara laki-laki perempuan, generasi muda dan tua, membangun pariwisata Pantai Seruni di Kabupaten Bantaeng.
3. Dimensi budaya, yaitu berupa mendorong masyarakat untuk menghormati budaya yang berbeda, membantu berkembangnya pertukaran budaya, budaya pembangunan melekat erat dalam budaya lokal pariwisata di Kabupaten Bantaeng
4. Dimensi lingkungan, yaitu mempelajari *carryng capacity area*, mengatur pembuangan sampah, meningkatkan kepedulian akan perlunya konservasi pariwisata Pantai Seruni di Kabupaten Bantaeng.
5. Dimesi politik, yaitu meningkatkan partisipasi dari penduduk lokal, peningkatan kekuasaan komunitas yang lebih luas, menjamin hak-hak dalam pengelolaan SDA di Kabupaten Bantaeng.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu penelitian ini akan dilaksanakan selama 2 (dua) bulan setelah seminar proposal penelitian, sedangkan lokasi penelitian ini akan dilaksanakan di Dinas Pariwisata Kabupaten Bantaeng dan Kawasan Pantai Seruni. Adapun alasan peneliti memilih lokasi tersebut karena wisata Pantai Seruni merupakan destinasi wisata favorit di Sulawesi Selatan dan ikon wisata Kabupaten Bantaeng, serta dapat dikatakan sebagai saingan dari Pantai Losari Makassar.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu suatu jenis penelitian yang memberikan gambaran tentang *Community-Based Tourism (CBT)* dalam Pengelolaan Pariwisata Pantai Seruni di Kabupaten Bantaeng.

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah deskriptif dengan didukung data kualitatif dimana peneliti berusaha untuk mengungkapkan suatu fakta atau realita mengenai *Community-Based Tourism (CBT)* dalam Pengelolaan Pariwisata Pantai Seruni di Kabupaten Bantaeng.

C. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer dikumpulkan melalui observasi, dokumentasi dan wawancara yaitu data yang diperoleh langsung dari informan melalui tatap

muka langsung dan terbuka sesuai dengan kebutuhan dalam penelitian ini.

2. Data Sekunder

Data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, referensi-referensi, peraturan perundang-undangan, dokumen, observasi, yang diperoleh dari lokasi penelitian.

D. Informan Penelitian

Pengambilan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, artinya menentukan informan dengan sengaja sesuai dengan kriteria terpilih yang relevan dengan fenomena *Community-Based Tourism (CBT)* dalam Pengelolaan Pariwisata Pantai Seruni. Dalam penelitian ini peneliti menetapkan informan yang betul-betul dapat memberikan informasi sesuai dengan penelitian yang sedang dilaksanakan. Adapun informan penelitian digambarkan sebagai berikut:

Tabel 3.1 Informan

No	Nama	Inisial	Jabatan	Ket
1.	H.Subhan, S.Sos.,M.Si	SH	Kepala Dinas Pariwisata Kab. Bantaeng	1 orang
2.	Zainal Arifin, SE	ZA	Kepala Bidang Pengembangan Destinasi	1 orang
3.	Suci Fatmawati	SF	Pengelola Wisata Pantai Seruni	1 orang
4.	Muh. Saing	MS	Masyarakat/ Pedagang kaki lima	1 orang
5.	Nurlinda	NL	Masyarakat/ Pedagang kaki lima	2 orang
6.	Sumarni	SM	Masyarakat/ Pedagang kaki lima	
Total Informan				6 orang

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini untuk memperoleh informasi atau data yang akurat sehingga dapat dipertanggungjawabkan sebagai suatu penelitian sosial yang ilmiah. Adapun cara-cara tersebut dapat dibagi atas tiga bagian, yakni melalui: observasi atau pengamatan, wawancara dan dokumentasi.

1. Observasi yaitu teknik pengumpulan data yang digunakan melalui observasi langsung atas pengamatan terhadap obyek yang diteliti. Alasan peneliti melakukan observasi adalah untuk menyajikan gambaran realistik perilaku atau kejadian, untuk menjawab pertanyaan, untuk membantu mengerti perilaku manusia, dan untuk evaluasi yaitu melakukan pengukuran terhadap aspek tertentu melakukan umpan balik terhadap pengukuran tersebut.
2. Wawancara, Penelitian ini dilakukan dengan cara mengadakan wawancara secara langsung (tanya jawab dalam bentuk komunikasi verbal) kepada semua informan yang ada. Teknik wawancara yang digunakan adalah teknik wawancara terstruktur dengan menyiapkan bentuk-bentuk pertanyaan yang sama antar informan satu dengan yang lainnya.
3. Dokumentasi yaitu pencatatan dokumen dan data yang berhubungan dengan penelitian ini. Data ini berfungsi sebagai bukti dari hasil wawancara di atas. Kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh data yang diperlukan dengan menelusuri dan mempelajari dokumen yang sudah ada. Hal ini dimaksud untuk mendapatkan data dan informasi yang berhubungan dengan materi penelitian.

Studi dokumentasi dilakukan dengan mempelajari buku-buku dan hasil laporan lain yang ada kaitannya dengan obyek penelitian.

F. Teknik Analisis Data

Sugiyono (2016) mengatakan bahwa analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data di lapangan model Miles dan Huberman, yang disebut pula dengan istilah teknik analisis data interaktif dimana analisis data dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Proses analisis data menurut model Miles dan Huberman yaitu meliputi aktivitas pengumpulan data, data reduction (reduksi data), data display (penyajian data), dan conclusion drawing atau penarikan kesimpulan/verifikasi (Miles dan Huberman dalam Sugiyono, 2016). Dalam penelitian kualitatif, kegiatan analisis data dimulai sejak peneliti melakukan kegiatan pra lapangan sampai dengan selesainya penelitian. Dalam penelitian kualitatif, teknik analisis data yang digunakan diarahkan untuk menjawab rumusan masalah.

1. Reduksi data merupakan komponen pertama analisis data yang mempertegas, memperpendek, membuat fokus membangun hal yang tidak penting dan mengatur data sedemikian rupa sehingga kesimpulan penelitian dapat dilakukan.

2. Sajian data merupakan suatu rakitan informasi yang memungkinkan kesimpulan secara singkat dapat berarti cerita sistematis dan logis agar makna peristiwanya menjadi lebih mudah dipahami.
3. Penarikan kesimpulan dalam awal pengumpulan data, peneliti sudah harus mulai mengerti apa arti dari hal-hal yang ditemui dengan mencatat peraturan-peraturan sebab akibat dan berbagai proporsi sehingga penarikan kesimpulan dapat dipertanggungjawabkan.

G. Pengabsahan Data

Pada penelitian kualitatif peneliti harus mampu mengungkap kebenaran yang objektif, karena itu keabsahan data dalam penelitian kualitatif sangat penting. Hal tersebut bertujuan untuk mengukur tingkat kepercayaan (kredibilitas) penelitian kualitatif sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Pengukuran keabsahan data pada penelitian ini dilakukan dengan triangulasi. Sugiyono (2016) mengatakan bahwa triangulasi adalah teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada.

Validasi data sangat mendukung hasil akhir penelitian, oleh karena itu diperlukan teknik untuk memeriksa keabsahan data. Keabsahan data dalam penelitian ini diperiksa dengan menggunakan teknik triangulasi. Dalam teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Teknik seperti ini juga menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama.

1. Triangulasi sumber dilakukan untuk menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.
2. Triangulasi Metode bermakna data yang diperoleh dari satu sumber dengan menggunakan metode atau teknik tertentu, diuji keakuratan atau ketidakakuratannya.
3. Triangulasi waktu berkenan dengan waktu pengambilan data. Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data, data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, belum banyak masalah, sehingga akan memberikan data yang lebih valid.
4. Mengadakan *Member check* adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. Tujuan *member check* adalah untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Pelaksanaan *member check* dapat dilakukan setelah satu periode pengumpulan data selesai, atau setelah mendapat suatu temuan atau kesimpulan. Caranya dapat dilakukan secara individual, dengan cara peneliti datang ke pemberi data, atau melalui forum kelompok.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Profil Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantaeng

a. Rencana Strategik Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantaeng

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantaeng memiliki rencana strategik yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu lima tahun, yaitu untuk tahun 2013-2018 dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan hambatan yang ada atau mungkin timbul. Rencana strategik Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantaeng meliputi visi, misi, tujuan, sasaran, serta pencapaian tujuan, dan sasaran tersebut akan diuraikan sebagai berikut:

b. Visi dan Misi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantaeng

Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantaeng tahun 2013-2018 menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi untuk lima tahun yang akan datang, dan harus mempunyai visi dan misi yang berorientasi pada masa yang akan datang. Program Dinas Kebudayaan dan Pariwisata diarahkan untuk mendukung dan bersinergi dengan program Kabupaten Bantaeng.

Visi dan misi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantaeng diformulasikan tidak terlepas dari visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng adalah mewujudkan Butta Toa Bantaeng sebagai destinasi wisata

yang berbasis kemandirian lokal. Guna mewujudkan visi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantaeng, perlu ditetapkan misi yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu. Misi tersebut merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dan menjadi sesuatu yang harus dilaksanakan oleh suatu organisasi agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Perumusan misi adalah merupakan suatu hal sangat penting untuk mengarahkan operasionalisasi organisasi sehingga tujuan organisasi dapat tercapai sesuai dengan visi yang telah ditetapkan. Sebagai penentu arah tindakan operasional organisasi, perumusan misi perlu mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantaeng.

Rumusan misi sebagai upaya untuk mewujudkan visi dimaksud adalah sebagai berikut:

- 1) Mengembangkan kawasan dan obyek wisata daerah termasuk tempat-tempat bersejarah dan obyek wisata budaya.
- 2) Mengembangkan seni budaya daerah sebagai daya tarik bagi wisatawan domestik maupun mancanegara.
- 3) Melibatkan masyarakat dalam pemeliharaan dan perawatan situs benda cagar budaya.
- 4) Meningkatkan image, daya tarik dan citra khas obyek wisata andalan.
- 5) Mensosialisasikan sadar wisata dan sapta pesona di kalangan pelajar dan masyarakat.
- 6) Melibatkan *stakeholder* dalam perencanaan pembangunan Kebudayaan dan

Pariwisata.

- 7) Mengembangkan usaha-usaha pariwisata dengan kerjasama mitra usaha dan investor.
- 8) Memberikan kemudahan bagi investor untuk bekerjasama mengembangkan obyek- obyek wisata.
- 9) Memberikan pembinaan dan pendidikan bagi lembaga/ organisasi seni, budaya dan sastra.

c. Tujuan dan Sasaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantaeng

Pada hakekatnya, tujuan merupakan penjabaran sejalan dengan visi dan misi yang telah ditetapkan, maka dirumuskan tujuan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantaeng selama lima tahun ke depan untuk memberikan arahan terhadap kebijakan yang akan diimplementasikan dalam bentuk program dan kegiatan. Adapun tujuan yang telah dijabarkan dalam kurun waktu 2013-2018 adalah meliputi:

- 1) Tersedianya standar operasional pelayanan
- 2) Terwujudnya industri dan karya budaya yang mengacu pada karakter budaya daerah dan perlindungan hukum individual dan komunal.
- 3) Tercapainya apresiasi, partisipasi dan kesadaran masyarakat terhadap pelestarian seni budaya daerah.
- 4) Tersedianya teknik dan strategi pemasaran pariwisata
- 5) Terciptanya produk khas Bantaeng
- 6) Terwujudnya sistem dan data base kebudayaan dan pariwisata

- 7) Tertariknya pihak swasta dalam pembiayaan dan pengelolaan obyek wisata yang berpotensi nilai jual tinggi
- 8) Meningkatnya kontribusi penerimaan pariwisata terhadap penerimaan daerah.
- 9) Terciptanya mutu produk wisata yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif
- 10) Terwujudnya desa dan kelurahan wisata andalan yang mandiri.

Setelah merumuskan tujuan, maka langkah selanjutnya adalah menetapkan sasaran sebagai bagian integral dalam proses perencanaan strategik. Fokus utama dalam penentuan sasaran tindakan dan alokasi sumber daya dalam melaksanakan kegiatan atau operasional organisasi setiap dalam kurun waktu lima tahun.

Selaras dengan tujuan dan visi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam lima tahun yang akan datang, dirumuskan sasaran yang ingin dicapai meliputi :

- 1) Terselenggaranya *good governance*
- 2) Terwujudnya sikap saling menghargai di antara berbagai komunitas seni budaya
- 3) Terciptanya seni dan budaya daerah yang menjadi ciri khas bagi tiap desa dan kelurahan.
- 4) Meningkatnya kontribusi dan partisipasi dalam berbagai even di dalam dan luar negeri
- 5) *Branding* produk pariwisata unggulan
- 6) Tercapainya peningkatan kualitas SDM aparatur dan pelaku pariwisata

- 7) Tercapainya akses informasi dan teknologi bagi masyarakat
- 8) Tercapainya peningkatan jumlah kunjungan, lama tinggal dan besarnya pengeluaran wisatawan
- 9) Terwujudnya pengembangan *agro, eco* dan *marine tourism*
- 10) Terciptanya paket- paket wisata yang khas desa.

Untuk mengembangkan berbagai potensi wisata daerah, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata memacu SDM dan SDA yang menjadi andalan bagi peningkatan sumber pendapatan daerah khususnya di bidang kebudayaan, kesenian dan pariwisata, telah dilaksanakan berbagai kegiatan dalam rangka mempromosikan potensi obyek dan daya tarik wisata agar dapat dikenal lebih luas oleh masyarakat domestik maupun mancanegara.

d. Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantaeng

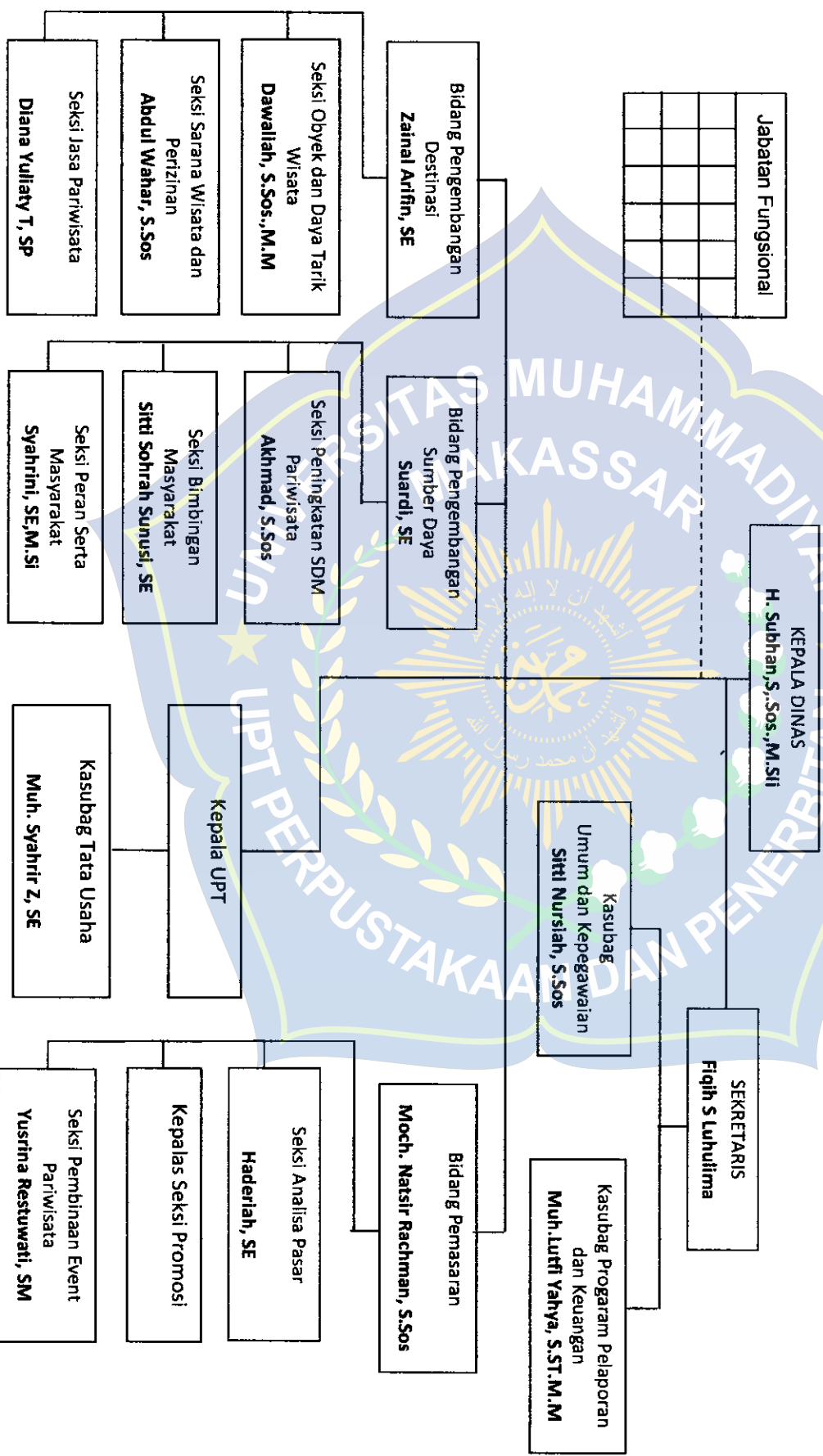
Struktur organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantaeng dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 19 Tahun 2010, yang meliputi:

- 1) Kepala Dinas
- 2) Sekretaris
 - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b) Sub Bagian Program dan Pelaporan
 - c) Sub Bagian Keuangan
- 3) Kepala Bidang Pengembangan Usaha Wisata
 - a) Seksi Obyek dan Daya Tarik Wisata

- b) Seksi Promosi dan Pameran
 - c) Seksi Sarana Wisata dan Perizinan
- 4) Kepala Bidang Pemasaran dan Pengembangan SDM
- a) Seksi Pemasaran dan Lembaga Wisata
 - b) Seksi Pengembangan SDM dan Penyuluhan
 - c) Seksi Analisa Pasar dan Investasi
- 5) Kepala Bidang Seni dan Budaya
- a) Seksi Pengembangan Seni Budaya
 - b) Seksi Kesenian Tradisional dan Modern
 - c) Seksi Sarana dan Prasarana Seni Budaya
- 6) Kepala Bidang sejarah dan Museum
- a) Seksi Suaka Peninggalan Sejarah dan Kepurbakalaan
 - b) Seksi Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional
 - c) Seksi Pengelolaan Museum dan Monumen
- 7) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
- 8) Kelompok Jabatan Fungsional

Tugas pokok Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantaeng adalah melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kebudayaan dan pariwisata, dari tugas pokok tersebut Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantaeng memiliki fungsi: Perumusan kebijakan teknis bidang kebudayaan dan pariwisata, Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang kebudayaan dan pariwisata, Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kebudayaan dan pariwisata.

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PARIWISATA KABUPATEN BANTAENG**



e. Keadaan Pegawai Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantaeng

Manajemen sumber daya manusia yang baik ditujukan kepada peningkatan kontribusi yang dapat diberikan oleh para pegawai dalam organisasi ke arah tercapainya tujuan organisasi. Tidak menjadi soal tujuan organisasi apa yang akan dicapai. Dibentuknya satuan organisasi yang mengelola sumber daya manusia dimaksudkan bukan sebagai tujuan, akan tetapi sebagai instrumen untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kerja organisasi secara keseluruhan.

f. Keadaan Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin

Untuk mengetahui keadaan sumber daya aparatur pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantaeng berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1. Keadaan Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah	Presentase
1.	Laki-laki	22 orang	64%
2.	Perempuan	17 orang	36%
	Jumlah	39 orang	100%

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, 2019

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah sumber daya aparatur pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantaeng dilihat dari jenis kelamin, sumber daya aparatur Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantaeng terdiri atas laki-laki: 22 orang (64%) dan perempuan: 17 orang (36%). Hal ini sangat berpengaruh terhadap pengelolaan objek wisata Pantai Seruni jika dilihat dari selisih jumlah yang tidak terlalu signifikan yaitu sekitar

28 %, mengindikasikan adanya keseimbangan antara laki- laki dan perempuan untuk berpartisipasi (*participation*) terutama dalam mengemukakan pendapat dan dalam pengambilan keputusan.

g. Keadaan Pegawai Berdasarkan Eselonisasi

Keadaan sumber daya aparatur pada Dinas kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantaeng berdasarkan eselonisasi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.2. Keadaan Pegawai berdasarkan Eselonisasi

No.	Esolon	Jumlah	Prosentase
1.	II	1 orang	1%
2.	III	5orang	15%
3.	IV	15 orang	35%
4.	Non Eselon	18 orang	49%
Jumlah		39 orang	100%

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, 2019

Tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah sumber daya aparatur pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantaeng berdasarkan eselonisasi terdiri atas eselonII: 1 orang (1 %), eselon III: 5 orang (15%), eselon IV : 15 orang, dan non eselon: 18 orang (49 %). Hal tersebut menunjukkan tingkatan pegawai yang telah memenuhi syarat untuk diserahi tanggung jawab sekaligus wewenang berdasarkan jabatan/eselon yang dipegangnya, juga menandakan bahwa mereka yang memegang eselon dianggap memiliki rasa tanggung jawab/akuntabilitas yang tinggi dan bisa merespon setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pimpinan, sehingga mampu mengimplementasikan perannya dalam pengelolaan objek wisata Pantai Seruni di Kabupaten Bantaeng.

2. Profil Pantai Seruni Kabupaten Bantaeng

Obyek dan daya tarik wisata bahari ini terletak di jalan seruni kelurahan pallantikang Kecamatan bantaeng Kabupaten Bantaeng, sekitar 6 km dari perbatasan jeneponto Bantaeng. Perjalanan menuju kesana dapat ditempuh sekitar 15 menit melewati jalan poros Bantaeng ke arah Kabupaten Bulukumba. Pantai Seruni ini letaknya tidak jauh dari jalan raya, dimana “Pantai Seruni ini yang dulunya bernama Pantai “selatan” memiliki nilai- nilai keunggulan dan keunikan secara fisik dan visual yang berupa sifat, karakter, budaya, bentuk dan lain sebagainya yang secara substansial mampu membawa dan menjadikan ruang rencana memiliki jati diri yang lebih unggul, unik, khas, moderen dan berbeda dari area- area lainnya.



Gambar 4.1. Pantai Seruni

Adapun bentuk keunikan dan keunggulan baik yang bersifat alamiah dan buatan yang dimiliki oleh Pantai Seruni Kabupaten Bantaeng adalah :

- a) Memiliki panorama pantai dan *sunset* yang indah
- b) Memiliki lapangan multifungsi, sentral sport seperti lapangan futsal, takraw, volly pantai dan olahraga pantai seperti jet ski dan banana boat. Pantai Seruni

ini juga letaknya berhadapan langsung dengan rumah sakit Internasional Anwar Makkatutu Kabupaten Bantaeng, dan tidak usah takut untuk kelaparan karna di Pantai Seruni ini ada banyak di sediakan warung makan yang berjejeran di pinggiran pantai dan cafe-cafe untuk sekedar ngopi sambil menikmati pisang epe sekalin melihat sunset disoreh hari. Tak usah khawatir untuk para anak-anak kecil karna di tempat ini juga telah disediakan permainan anak seperti kereta malam, sepeda santai, scuater, mobil remot dll.

- c) Aksesibilitas untuk mencapai lokasi obyek wisata ini cukup baik karena terletak tidak jauh dari jalan raya, juga tersedia jalan setapak untuk mencapai lokasi obyek wisata dari jalan raya.
- d) Pantai Seruni ini memiliki 4 buah gasebo dan tribun sebagai tempat penjamuan para tamu bupati dari luar kota atau kabupaten lain yang berkunjung ke kabupaten Bantaeng, yang ditempatkan sedemikian rupa sebagai fasilitas yang disiapkan bagi pengunjung untuk beristirahat sambil menikmati panorama pantai, *sunrise* maupun *sunset*-nya.

Berkaitan dengan pengelolaannya, Pantai Seruni memiliki beberapa orang petugas yang terdiri dari tenaga honorer Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantaeng maupun dari masyarakat di sekitar Pantai Seruni sebagai upaya pemberdayaan masyarakat lokal, petugas pengamanan (SATPOL PP), petugas *life guard*, petugas kebersihan dan petugas pemberi informasi pariwisata, karena di Pantai Seruni juga terdapat Pusat Informasi Pariwisata (*Tourism Information Centre*).

Adapun rincian untuk petugas-petugas yang ditempatkan di Pantai Seruni tersebut adalah:

- 1) Petugas SATPOL PP 8 orang yang bertugas secara bergantian
- 2) Petugas *life guard* 1 orang (masyarakat setempat)
- 3) Lascar kebersihan 12 orang yang bertugas secara bergantian (pagi,siang,dan malam)
- 4) Petugas informasi 2 orang.

B. *Community-Based Tourism* (CBT) dalam Pengelolaan Pariwisata Pantai Seruni di Kabupaten Bantaeng

Tata kelola kepariwisataan yang memberikan kesempatan kepada masyarakat lokal untuk mengontrol dan terlibat aktif dalam pengembangan pariwisata ini bisa dilihat dari setiap adanya kegiatan di wisata Pantai seruni. Dalam hal pengembangan wisata partisipasi masyarakat lokal sangat penting. Masyarakat yang ikut serta dalam perencanaan, pengelolaan, dan pengembangan akan lebih membantu dalam pengelolaan pengembangan dalam sektor pariwisata. Rencana program masyarakat biasanya dibuat ditingkat pusat dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Masyarakat seringkali diikutkan tanpa diberikan pilihan untuk memberi saran atau masukan. Program yang dilakukan dengan tehnik seperti itu seringkali tidak berhasil dan kurang memberi manfaat terhadap masyarakat karena masyarakatnya sendiri tidak diikutsertakan sehingga mereka merasa kurang bertanggung jawab terhadap keberhasilan program tersebut.

Maka dari itu, terciptalah model pariwisata berbasis masyarakat atau yang disebut (*Community Based Tourism*) pariwisata yang menyadari keberlangsungan

budaya, sosial, lingkungan. Bentuk pariwisata ini dikelola dan dimiliki oleh masyarakat, guna membantu para wisatawan untuk meningkatkan kesadaran mereka. Dengan demikian *Community Based Tourism* merupakan model pengembangan pariwisata yang berasumsi pada kebutuhan masyarakat sebagai upaya membangun pariwisata yang lebih bermanfaat bagi kebutuhan, inisiatif dan peluang masyarakat lokal.

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif tentang *Community-Based Tourism* (CBT) dalam Pengelolaan Pariwisata Pantai Seruni di Kabupaten Bantaeng. Penelitian ini menggunakan lima dimensi untuk mengembangkan wisata berbasis masyarakat menurut Suansri yang diantara lain adalah dimensi Politik, Dimensi Sosial, Dimensi Budaya, Dimensi Lingkungan, dan Dimensi Ekonomi, sebagaimana yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Ekonomi

Dimensi ekonomi yaitu berupa adanya dana untuk pengembangan komunitas, terciptanya lapangan pekerjaan di sektor pariwisata Pantai Seruni di Kabupaten Bantaeng. Dampak perekonomian masyarakat khususnya masyarakat yang ikut dalam kelompok Laskar Kebersihan dan masyarakat yang bekerja dan berjualan di wisata sangatlah terlihat. Dimensi ekonomi ini hadir dalam pengembangan pariwisata berbasis masyarakat. Dalam sektor pariwisata masyarakat harus merasakan dampak ekonomi. Sebuah pariwisata dikatakan berhasil dalam segi CBT haruslah memperhatikan ekonomi masyarakat, apakah dengan adanya wisata ini masyarakat mampu memenuhi dan menggantungkan

hidupnya di pariwisata yang mereka punya. Dengan adanya pariwisata ini diharapkan bisa mengurangi tingkat kemiskinan yang ada di sebuah daerah.

Sebuah pariwisata harusnya mempunyai dana untuk mengembangkan potensi wisata yang dipunya wisata Pantai Seruni. Pada awalnya pantai ini kumuh, tak menarik, bahkan menurut masyarakat setempat menyeramkan. kemudian disulap menjadi cantik dan rapi oleh pemerintah. Pantai Seruni ini merupakan kawasan hasil reklamasi sepanjang satu setengah kilometer sebagaimana hasil wawancara yang disampaikan oleh Kepala Dinas Parawisata Kabupaten Bantaeng bahwa :

“Pantai Seruni ini merupakan kawasan hasil reklamasi sepanjang satu setengah kilometer yang dibangun oleh Bupati Bantaeng pak Nurdin Abdullah pada saat itu. Awalnya pantai ini kumuh, tak menarik, bahkan, menurut masyarakat setempat, menyeramkan, pantai ini disulap jadi rapi dan cantik. Pak Nurdin menjadikan Pantai Seruni sebagai pusat kegiatan masyarakat. Alun-alun Bantaeng dan rumah sakit kelas internasional RSUD Prof Dr Andi Makkatutu dibangun di pantai ini, di atas tanah hasil reklamasi, ada juga restoran yang dibangun di atas laut. Restoran ini merupakan bantuan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Awalnya mau dibangun di dekat pelabuhan, namun pak Nurdin usul agar dibangun di Pantai Seruni, agar ramai banyak pembeli.” (Hasil wawancara dengan SH pada tanggal 25 Februari 2021).

Pantai Seruni saat ini bagi kehidupan masyarakat Bantaeng membawa perubahan yang sangat jauh berbeda dibandingkan sebelum adanya kawasan pantai Seruni tersebut. Selain membawa dampak sosial juga membawa dampak ekonomi bagi masyarakat. Keberadaan pantai Seruni memberikan banyak peluang dan kesempatan yang lebih baik untuk mengembangkan usaha yang berguna bagi peningkatan taraf kesejahteraan masyarakat. Sejak pemerintah terus memperbaiki dan mengembangkan sarana yang ada di pantai Seruni, masyarakat mulai menciptakan upaya-upaya kreatif dalam memanfaatkan dagangannya sebagai

alternatif mencari sumber-sumber penghasilan. Banyaknya pedagang yang berdagang di kawasan pantai tersebut menjadikan para pedagang harus terus meningkatkan kreatifitasnya dalam menarik pengunjung baik dari segi makanan maupun dari segi kenyamanan agar pengunjung tertarik membeli dagangannya guna meningkatkan pendapatan setiap harinya.

Keberadaan kuliner pantai Seruni memberikan dampak bagi peningkatan pendapatan yang berimbas pada kesejahteraan masyarakat. Dulunya masyarakat sekitar mendapatkan penghasilan rata-rata Rp.500.000 perbulan. Dapat dipastikan adanya kawasan pantai Seruni ini telah memberikan inspirasi pengembangan usaha yang lebih baik, sehingga mampu memberikan pemasukan yang akhirnya meningkat setelah adanya kawasan Pantai Seruni yang rata-rata penghasilan Rp. 5.000.000 sampai Rp.7.000.000 perbulan. Seperti penuturan salah satu masyarakat atau pedagang di pantai seruni berikut ini:

“Pendapatan yang saya dapat perbulan Alhamdulillah bisa dibilang sangat banyak karena bisa mencukupi kebutuhan keluargaku dibandingkan sebelum adanya kawasan pantai Seruni ini” (Hasil wawancara dengan NL pada tanggal 2 Maret 2021).

Hal yang sama juga diutarakan oleh salah satu informan sebagaimana hasil wawancara berikut:

“ada perubahan pendapatan yang saya rasakan dimana dulu saya cuma pegawai honor tapi setelah saya membuka café disini (pantai Seruni) Alhamdulillah saya bisa memenuhi kebutuhan hidup saya” (Hasil wawancara dengan SM pada tanggal 2 Maret 2021).

Pada dasarnya informan diatas mengalami peningkatan dari sebelum Kawasan Pantai Seruni ini ada. Pendapatan mereka terasa lebih besar apabila waktu libur dan hari/malam sabtu-minggu. Masyarakat yang berdagang di pantai tersebut juga merasa senang karena tidak adanya pungutan biaya untuk tempat

berdagang dari pemerintah serta kenyamanannya karena kawasan pantai Seruni sangat bersih dan nyaman sehingga para pedagang sangat senang. Seperti yang diutarakan oleh salah satu pedagang yang mengatakan bahwa:

“Kami disini senang karena selain pendapatan kami yang meningkat, pemerintah juga tidak memungut biaya untuk tempat kami berdagang kerana disini kami digratiskan dari pungutan biaya apapun selain itu juga kami disediakan gerobak yang diberikan secara gratis” (Hasil wawancara dengan MS pada tanggal 2 Maret 2021).

Masyarakat menjadi kata kunci kesuksesan pengembangan daerah. Karena itu, pemerintah menyadari bahwa masyarakat harus mampu mencapai kesejahteraan baik dari segi ekonomi maupun dari segi sosial budaya. Pemerintah saat ini memprioritaskan untuk memfasilitasi masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya alam dan budaya yang dimiliki untuk kesejahteraan masyarakat. Keberadaan Pantai Seruni saat ini tidak lepas dari campur tangan Pemerintah yang telah mengubah kawasan pantai yang dulunya hanya seperti pantai biasa pada umumnya kini menjadi pantai yang menjadi tempat yang sangat terkenal di Kabupaten Bantaeng. Cara pemerintah mempertahankan eksistensi kawasan Pantai Seruni tersebut yaitu dengan terus memperbaiki serta membangun berbagai infrastruktur dikawasan pantai tersebut sehingga masyarakat yang berkunjung ke pantai Seruni tidak akan pernah merasa bosan berada di pantai tersebut karena di pantai Seruni selain terdapat banyak sentra kuliner juga terdapat spot olahraga dan juga RSUD, selain itu juga pengunjung disuguhkan pemandangan yang indah ketika sore hari dikawasan pantai Seruni. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Kabupaten Bantaeng yang mengatakan bahwa :

“Pembangunan pusat kuliner pantai seruni Kabupaten Bantaeng, menelan anggaran sekitar Rp 1,8 miliar. proyek kegiatan pengerjaan fasilitas pengembangan usaha kecil menengah, dana bersumber dari APBD. Ini semua dilakukan demi meningkatkan taraf perokonomian masyarakat” (Hasil wawancara dengan ZA pada tanggal 26 Februari 2021).

Salah satu ciri dari pariwisata berbasis masyarakat yaitu mampu menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat di dalam pariwisata itu sendiri. Hal ini ditetapkan juga di wisata Pantai Seruni. Didaerah tersebut dulu tingkat kemiskinan tinggi dan banyak masyarakat yang menganggur. Sejak adanya wisata Pantai Seruni ini mampu memberikan dampak ekonomi dengan menciptakan lapangan pekerjaan. Meningkatnya pendapatan dari sektor pariwisata ini hanya dirasakan oleh kelompok dan yang membuka usaha di wisata, untuk masyarakat yang tidak bekerja dan tidak mempunyai usaha di wisata tersebut pendapatan mereka tetap- tetap saja seperti biasanya. Jadi dapat disimpulkan bahwa dengan adanya sektor pariwisata di daerah tersebut dapat menghasilkan pendapatan.

Indikator pada prinsip ekonomi dalam *Community Based Tourism* (CBT) adalah timbulnya dana untuk pengembangan komunitas, terciptanya lapangan pekerjaan di sector pariwisata, dan timbulnya pendapatan masyarakat lokal (Suansri, 2003). Dari kutipan wawancara informan diatas, mereka mengakui adanya peningkatan pendapatan dari sebelum berdagang di kawasan Pantai Seruni. Dari peningkatan ini mereka bisa memperbaiki taraf hidup mereka dan keluarganya. mengenai dampak ekonomi dari keberadaan Pantai Seruni pada kehidupan masyarakat berdampak positif bagi kehidupan ekonomi terutama dalam peningkatan pendapatan, memberi peluang pekerjaan, sekaligus sebagai alat untuk mengembangkan usaha dan pada akhirnya mampu merubah taraf/kesejahteraan

hidup masyarakat tersebut dan kelak diharapkan dapat menjadi sumber mata pencaharian lain yang lebih baik dari sektor pertanian/nelayan yang sudah melekat pada masyarakat Kabupaten Bantaeng.

2. Sosial

Dalam dimensi sosial ada beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur pariwisata berbasis masyarakat, indikator pertama yaitu meningkatkan kualitas hidup masyarakat, kedua yaitu peningkatan kebanggaan komunitas. Ketiga yaitu adanya peran yang adil antara laki-laki dan perempuan, generasi muda dan generasi tua. Dimensi sosial ini untuk mengukur apakah setelah adanya pariwisata mampu meningkatkan dampak sosial dalam kehidupan masyarakat di Kabupaten Bantaeng.

Dimensi sosial dalam pariwisata berbasis masyarakat menurut Suansri harus terpenuhi agar pariwisata tersebut mampu dikelola dan dikembangkan dalam sudut pandang CBT, sehingga dalam kasus yang seperti ini CBT mampu memberikan dampak pariwisata yang berguna bagi masyarakat lokal. Tidak hanya tentang keterlibatan dan peran aktif masyarakat yang lebih meningkat dari sebelumnya, namun kualitas hidup masyarakat dan kehidupan masyarakat dengan masyarakat, dan masyarakat dengan kelompok serta kelompok dengan kelompok bisa memberikan dampak yang berguna bagi kelangsungan hidup masyarakat.

Pemerintah kabupaten Bantaeng memastikan kegiatan wisata pantai Seruni memberikan manfaat bagi masyarakat. Keyakinan tersebut didasari pada aspek kegiatan wisata banyak melibatkan masyarakat dan seluruh keuntungan dikelola oleh masyarakat itu sendiri tanpa membagi keuntungan tersebut kepada

pemerintah. Sebagaimana yang disampaikan oleh pengelola pantai seruni bahwa :

“Kalau untuk memastikan bahwa manfaat kegiatan wisata pantai seruni dapat dirasakan oleh masyarakat saya mengacu pada pendapatan masyarakat sebagai hasil dari kegiatan wisata, dimana keseluruhan pendapatan tersebut dikelola dan dilaksanakan oleh masyarakat tanpa retribusi kepada pemerintah. Hal tersebut merupakan sebuah bukti bahwa kegiatan wisata pantai seruni memberikan manfaat bagi masyarakat. Selain itu wisata pantai seruni bisa digunakan masyarakat sebagai lokasi wisata rohani karena kondisi pantai yang sangat nyaman, bagi saya itu salah satu manfaat yang bisa dirasakan oleh masyarakat.” (Hasil wawancara dengan SF pada tanggal 20 Februari 2021).

Hasil wawancara diatas dapat dilihat manfaat dari kegiatan wisata di pantai Seruni dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dimana seluruh pendapatan dapat dikelola oleh masyarakat demi meningkatkan perekonomiannya tanpa perlu ada retribusi kepada pemerintah. Disisi lain keberadaan wisata pantai seruni dapat dijadikan wisata rohani bagi masyarakat setempat.

Pengembangan destinasi pariwisata memerlukan teknik perencanaan yang baik dan tepat. Teknik pengembangan harus menggabungkan beberapa aspek penunjang kesuksesan pariwisata. Salah satunya adalah dimana masyarakat dapat merasakan manfaat dari kegiatan wisata. Pada dasarnya pembangunan industri pariwisata untuk meningkatkan perekonomian masyarakat disuatu tempat sehingga keterlibatan masyarakat dalam pengembangan wisata sangat penting. Pengelola objek wisata pantai seruni akan terus memastikan bahwa kegiatan wisata pantai seruni akan senantiasa memberikan mafaat bagi masyarakat. Selain manfaat dalam bidang ekonomi pihak pengelola juga berharap ada manfaat dalam bidang lain, sebagaimana yang diungkapkan oleh kepala dinas pariwisata kabupaten Bantaeng bahwa:

“Pengelolaan pariwisata pantai seruni memang kami arahkan agar bermanfaat bagi kehidupan masyarakat, itu merupakan tujuan kami yang paling dasar. Dapat kita lihat bahwa siklus perekonomian khususnya di Bantaeng ini sangat berkembang pesat dengan banyaknya masyarakat dari luar yang berkunjung kemari, dan salah satu alasan orang banyak berkunjung ke Bantaeng karena objek wisata pantai Seruni tersebut. Tentu hal ini adalah manfaat langsung yang bisa dirasakan masyarakat, khususnya yang berada disekitar lokasi wisata.” (Hasil wawancara dengan SH pada tanggal 25 Februari 2021).

Hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa kegiatan wisata pantai seruni membuat orang banyak berkunjung ke Bantaeng secara tidak langsung datangnya masyarakat dari luar yang berkunjung ke Bantaeng tersebut dapat meningkatkan perekonomian masyarakat di Bantaeng, hal tersebut adalah salah satu manfaat dari kegiatan wisata pantai Seruni.

Pariwisata terbukti telah mengangkat kehidupan masyarakat, karena sektor ini mampu menggerakkan roda perekonomian di segala lapisan masyarakat dan berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat, sekaligus mampu mendorong pertumbuhan dan pengembangan wilayah. Namun demikian, perlu disadari bahwa upaya-upaya pengembangan pariwisata yang dilaksanakan oleh pemerintah sangat membutuhkan dukungan penuh dan partisipasi aktif dari masyarakat. Oleh karena itu sebagai upaya untuk membangun dukungan dan partisipasi masyarakat, pemerintah secara sistematis dan terus menerus berupaya menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya dukungan semua pihak terhadap pengembangan sektor kepariwisataan.

Dampak yang sangat dirasakan oleh masyarakat Bantaeng adalah masyarakat yang tingkat penganggurannya tinggi, tingkat partisipasi sesama masyarakat rendah, tingkat pendidikan juga rendah. Masyarakat perempuan

mayoritas hanya sebagai ibu rumah tangga. Namun, dengan adanya kepedulian pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah yang kemudian tidak disangka menjadi tempat destinasi wisata baru di Kabupaten Bantaeng, wisata Pantai Seruni kini mulai menyita perhatian banyak publik.

Wisata pantai Seruni sudah dikenal banyak orang. Sebuah sektor pariwisata berbasis masyarakat dikatakan berjalan dengan baik apabila komunitas dan masyarakat merasa bangga dengan hasil yang sudah dicapai. Hal ini juga dirasakan oleh masyarakat Bantaeng seperti yang disampaikan oleh salah satu penjual yang berjualan di wisata Pantai Seruni mengatakan bahwa :

“Kalau dibilang bangga, ya bangga nak dengan apa yang lakukan pemerintah sampai seperti sekarang ini, apalagi dulunya pantai seruni tidak dikenal orang, sekarang sudah dikenal banyak orang, dengan kerja keras mereka, akhirnya pantai seruni menjadi wisata, dan dengan adanya wisata ini saya bisa berjualan disini. Kan dulunya saya hanya seorang ibu rumah tangga. Karena adanya wisata ini saya sekarang bisa membantu suami saya untuk membayar uang kuliah anak saya” (Hasil wawancara dengan NL pada tanggal 2 Maret 2021).

Pengelolaan pariwisata dapat dikatakan sebagai manajemen yang merupakan suatu peran yang dijalankan oleh sekelompok orang atau bisa menunjuk pada fungsi-fungsi yang melekat pada peranan tersebut. Pembagian peran yang adil dalam suatu kelompok merupakan indikator pariwisata berbasis masyarakat bisa dikembangkan. Pembagian peran dirasa perlu untuk sebuah pengelolaan pariwisata yang ditinjau dari segi CBT.

Pada prinsip sosial dalam *Community Based Tourism* (CBT) dengan indikator yang ditetapkan Suansri (2003) adalah adanya peningkatan kebanggaan komunitas, pembagian peran yang adil antara laki-laki dan perempuan, generasi muda dan tua, dan terdapat mekanisme penguatan organisasi komunitas. Sebagai

hasil observasi penulis dilapangan pada prinsip sosial dalam *Community Based Tourism* (CBT) dengan gambaran mengenai adanya peningkatan kebanggaan komunitas terlihat dengan adanya kebersamaan kelompok ini dengan masyarakat setempat dalam melayani pengunjung sebagai suatu masyarakat yang masih menjunjung tinggi semangat kekeluargaan dan kebersamaan. Mereka berusaha memberikan pelayanan yang terbaik bagi para pengunjung untuk memberikan kesan sebagai tuan rumah yang baik.

3. Budaya

Dimensi budaya adalah seperangkat hal yang ada dalam wisata. Dengan adanya pariwisata masyarakat tidak boleh melupakan tentang budaya-budaya yang ada dalam lingkungan masyarakat sendiri. Masyarakat perlu menghargai setiap adanya budaya, dan kita juga mengenalkan budaya kita kepada wisatawan agar para wisatawan yang lain mengenal wisata kita dengan adanya budaya yang berbeda dari tempat wisata lainnya.

Masyarakat Bantaeng setiap hari bertemu dengan pengunjung dari berbagai daerah setiap harinya. Para pengunjung datang dengan membawa budaya mereka. Masyarakat Bantaeng harus mencoba menghormati budaya yang dibawa oleh mereka. Kama masyarakat Bantaeng sebagai tuan rumah, jadi sebagai tuan rumah kita harus menghormati mereka. Menghormati budaya yang berbeda ini sangat penting dalam pariwisata berbasis masyarakat karena masyarakat sebagai aktor dalam penyelenggaraan tersebut yang dituntut untuk menghargai setiap budaya yang masuk. Masyarakat harus memahami karakter tamu-tamunya. Mereka harus selalu bersikap ramah kepada pengunjung. Masyarakat Bantaeng awalnya merasa

takut untuk menghadapi banyak orang, seperti yang dikatakan oleh salah satu informan selaku penjual di sana yang mengatakan bahwa:

“Dulu awal-awal ada wisata ini ada orang yang mau wawancara seperti kita ini, kalau dulu saya pribadi malas untuk menjawab-jawab yang kayak begituan, takut juga, takut salah ngomong. Kalau awal-awal kita sebagai penjual menyuruh mereka mewawancara ke pengelolanya wisata ini. Dan sekarang makin banyak orang yang wawancara gitu kami sudah tidak takut lagi, sekarang malah kalau ada yang wawancara merasa senang dan bangga wisata ini dikenal banyak orang”. (Hasil wawancara dengan SM pada tanggal 2 Maret 2021).

Pariwisata berbasis budaya berupa suguhan keasrian alam serta keunikan seni tradisi masyarakat lokal sebagai daya tarik utama para wisatawan. Akan tetapi, kunjungan wisatawan tersebut dikhawatirkan berdampak pada aspek kultural masyarakat lokal, yaitu munculnya pergeseran idealisme kultural yang menjunjung tinggi nilai-nilai budaya sebagai *way of life* menjadi idealisme pasar yang didasarkan pada motif memperoleh keuntungan. Keberadaan lokasi wisata pantai Seruni memiliki dampak yang negatif bagi masyarakat utamanya pada karakter dan budaya masyarakat sehingga perlu proses yang mendalam agar kondisi tersebut terjadi kepada masyarakat disekitar wisata pantai Seruni sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Kabupaten Bantaeng bahwa:

“Bantaeng sudah mengalami kemajuan dibanding dahulu, namun masih ada beberapa yang mempertahankan kebudayaannya yang paling nyata seperti sikap ramah dari masyarakat asli disana, karakter masyarakat yang ramah dan terbuka terhadap dunia luar sebagai bukti penerimaan masyarakat terhadap orang-orang baru yang datang di Bantaeng. Salah satu bentuk untuk mempertahankan karakteristik masyarakat disana adalah dengan membentuk komunitas masyarakat, seperti misalnya kerukunan keluarga Bantaeng, lembaga adat dan kelompok-kelompok masyarakat lainnya. Pemerintah berupaya memfasilitasi bentuk kebutuhan masyarakat sehingga tidak tergerus dengan kebudayaan dari luar.” (Hasil wawancara dengan ZA pada tanggal 26 Februari 2021).

Hasil wawancara diatas salah satu bentuk upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam menjaga karakteristik dan budaya masyarakat Bantaeng agar tetap terjaga dengan mendukung pembentukan lembaga-lembaga adat dan juga memfasilitasi segala bentuk kebutuhan lembaga tersebut sehingga tidak tergerus oleh budaya yang datang dari luar.

Kehidupan manusia dikelilingi oleh budaya, hal ini disebabkan karena manusia selalu berupaya mempertahankan eksistensinya dalam kehidupan yang mengharuskannya selalu bersinggungan dengan lingkungan sekitar, baik lingkungan fisik dan non fisik. Proses pembentukan budaya berlangsung berabad-abad dan teruji sehingga membentuk suatu komponen yang handal, terbukti dan diyakini dapat membawa kesejahteraan lahir dan batin. Komponen inilah yang disebut dengan jati diri. Karakter merupakan representasi identitas seseorang yang menunjukkan ketundukannya pada aturan atau standar moral yang berlaku dan merefleksikan pikiran, perasaan dan sikap batinnya yang termanifestasi dalam kebiasaan berbicara, bersikap dan bertindak.

Semangat gotong royong dan saling menghargai merupakan bentuk karakteristik asli dari masyarakat Bantaeng. Keberadaan lokasi wisata pantai Seruni merupakan salah satu manifestasi dalam pengimplementasian karakter tersebut dimana masyarakat selalu menghargai bentuk aktifitas yang dilakukan dilokasi tersebut, sebagaimana hasil wawancara oleh kepala dinas pariwisata kabupaten Bantaeng mengatakan bahwa:

“Kalau saya melihat karakter masyarakat Bantaeng itu saling menghargai, semangat gotong royong yang tinggi dan ini kemudian yang harus dipelihara oleh pemerintah. Katakanlah segala bentuk kegiatan yang berada di pantai Seruni walaupun bertentangan dengan budaya masyarakat

setempat tapi masyarakat menghargai itu sebagai bentuk karakter budaya orang. Bahkan masyarakat pendatang di Bantaeng sangat kagum dengan karakter menghargai tersebut dan masyarakat pendatangpun mencontohinya. Bentuk pemeliharaan yang kami lakukan adalah selalu memberi ruang kepada masyarakat Bantaeng khususnya yang berada di kawasan pantai seruni untuk senantiasa berkreasi dan mengembangkan potensinya selama itu tidak bertentangan dengan aturan, silahkan dilaksanakan.“ (Hasil wawancara dengan SH pada tanggal 25 Februari 2021).

Hasil wawancara diatas merupakan bentuk pemeliharaan terhadap karakteristik lokal dengan memberikan ruang gerak berkreasi bagi masyarakat Bantaeng agar tidak tergerus oleh kemajuan zaman selama ketentuan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan yang telah ditetapkan. Derasnya arus globalisasi, modernisasi dan ketatnya puritanisme dikhawatirkan dapat mengakibatkan terkikisnya rasa kecintaan terhadap kebudayaan lokal. Sehingga kebudayaan lokal yang merupakan warisan leluhur terinjak-injak oleh budaya asing, tereliminasi di kandangnya sendiri dan terlupakan oleh para pewarisnya. Kehadiran industri pariwisata tidak lantas menghilangkan karakteristik dari masyarakat yang berada disekitar lokasi wisata namun justru dengan kebudayaan setempat para pengelola wisata dapat menjadikan daya tarik bagi pengunjung dalam kegiatan berwisata.

Masyarakat yang berada disekitar wisata pantai seruni sendiri memandang bahwa mempertahankan karakter dan budaya merupakan hal yang wajib sebagai ciri dari masyarakat Bantaeng itu sendiri. Kemajemukan di Bantaeng dengan adanya beberapa industri termasuk pariwisata tidak lantas membuat masyarakat pesimis justru hal tersebut membuat mereka semakin kuat untuk bersaing dengan budaya yang lain. Sebagaimana diungkapkan oleh salah satu masyarakat yang ada

di pantai seruni bahwa:

”Banyak sekali masyarakat dari luar yang sekarang tinggal di Bantaeng. Tentunya mereka datang dengan budaya masing-masing, tetapi sebagai tuan rumah kami tidak merasa tergerus justru kami semakin semangat untuk mempertahankan budaya kami. Lagi pula semakin banyak budaya semakin bagus kita bisa saling bertukar pemikiran. Sebenarnya bertahan atau tidak sebuah budaya itu tergantung masyarakat, kalau mereka melupakan budayanya pasti akan hilang, tapi kami selalu bangga dengan budaya yang kami warisi dari dulu, tentu kami wajib untuk mempertahankannya.” (Hasil wawancara dengan MS pada tanggal 2 Maret 2021).

Hasil wawancara diatas dapat dilihat hadirnya pariwisata di Bantaeng membuat kemajemukan masyarakatnya pun semakin tinggi, namun hal tersebut justru menjadi kekuatan bagi masyarakat lokal untuk senantiasa mempertahankan budaya yang mereka warisi dari pendahulu mereka.

Pada prinsip budaya dengan indikatornya menurut Suansri (2003), adalah mendorong masyarakat untuk menghormati budaya yang berbeda, mendorong berkembangnya pertukaran budaya, dan adanya budaya pembangunan yang melekat erat dalam budaya lokal. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan menunjukkan bahwa pengelolaan wisata pantai seruni terdapat prinsip budaya yang diterapkan dalam *Community Based Tourism* (CBT). Namun berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti, ditemukan bahwa umumnya masyarakat setempat masih kaku dan malu dalam menyambut pengunjung sehingga upaya untuk menghormati budaya yang berbeda belum maksimal. Hal ini bisa dilihat ketika ada pengunjung maka beberapa masyarakat masih menatap lama pengunjung tanpa memberi senyum sedikitpun, pengunjung hanya menerima sambutan dari para pedagang saja sehingga berkesan belum ada penghargaan terhadap budaya yang berbeda secara maksimal. Begitu juga dengan pertukaran

budaya belum muncul disebabkan karena tidak adanya antraksi budaya yang disuguhkan terhadap pengunjung baik itu pertunjukan seni, maupun hasil karya yang sangat khas dan unik yang mampu membuat mereka penasaran dan ingin mengetahuinya.

4. Lingkungan

Dalam sebuah pariwisata perlu adanya keberlanjutan lingkungan, dimensi lingkungan sangat penting dalam mengukur sebuah pengembangan pariwisata berbasis masyarakat. Dimensi lingkungan dalam pariwisata berbasis masyarakat merupakan alat bagi masyarakat untuk mengedepankan perlindungan lingkungan dan mampu memberikan edukasi bagi masyarakat setempat tentang pentingnya konservasi. Dimensi lingkungan dalam pengembangan wisata Pantai Seruni memberikan dampak yang cukup besar dari sebelumnya. Selain perilaku masyarakat yang berubah, dari segi lingkungannya bisa dikatakan berhasil menjalankan pariwisata dalam perspektif CBT ditinjau dari segi dimensi lingkungan. Sudah ada konservasi lingkungan. Masyarakat kini sudah sadar betapa pentingnya konservasi bagi daerah mereka. Dengan adanya penanaman pohon, abrasi mulai berhenti dan sumber air yang berada dekat pantai sudah tidak asing lagi karena pohon juga bisa sebagai filter.

Pariwisata umumnya didasarkan atas ketersediaan sumberdaya alam seperti udara, daratan dan air. Sumberdaya alam tersebut dijadikan obyek sekaligus produk bagi industri pariwisata. Ekosistem alam akan rusak jika perencanaan, pengembangan dan pengoperasiannya tidak diatur dengan pantas. Di lain pihak jika dikembangkan secara berkelanjutan, pariwisata dapat menjadi kekuatan

positif bagi konservasi lingkungan. Pentingnya bagi para pengelola pariwisata untuk melibatkan masyarakat dalam pengembangan pariwisata dikarenakan masyarakat yang sangat paham akan kondisi geografi dari alam tempat masyarakat bermukim. Salah satu daya tarik yang dimiliki oleh pantai Seruni adalah keindahan alam yang masih sangat alami sehingga pengunjung selalu memprioritaskan pantai Seruni sebagai tempat untuk melakukan kegiatan wisata. Keindahan alam tersebut tentu menjadi tanggung jawab bagi pemerintah dan pengelola untuk senantiasa menjaganya agar tidak rusak akibat dari pengembangan wisata. Seperti hasil wawancara yang disampaikan oleh Kepala Bidang Pengembangan Destinasi kabupaten Bantaeng bahwa :

“Daya tarik pantai seruni itu karena terletak di tengah kota bantaeng, itu salah satu kelebihan dari pantai seruni. Pemerintah selalu menekankan kepada pihak pengelola untuk memberhatikan stabilitas lingkungan dalam pengembangan wisata, apa lagi banyak pembangunan disana. Tentu harus ada mekanisme perencanaan yang baik agar cagar alam disana tidak rusak. Selain itu yang paling penting adalah himbauan bagi pengunjung untuk senantiasa menjaga kebersihan, kita sering mendapati air tercemar oleh limbah-limbah plastik bekas pengunjung. Harus memang ada kesadaran dari pengunjung agar kita saling menjaga kestabilan lingkungan.” (Hasil wawancara dengan ZA pada tanggal 26 Februari 2021).

Hasil wawancara diatas dapat dilihat pemerintah telah melakukan upaya agar dalam pembangunan wisata harus pada perencanaan yang matang sehingga tidak merusak lingkungan. Pemerintah cukup menyayangkan masih banyaknya pengunjung yang membuang sampah sembarangan sehingga dapat mencemari lingkungan wisata. Pariwisata dinilai merupakan industri yang tak berasap dan tidak memiliki produk, namun tak dapat dihindari fakta dimana pembangunan fasilitas wisata secara mendasar merubah lingkungan dan komunitasnya. Semenjak awal pembangunan berkelanjutan telah menjadi kesatuan konsep untuk

perencanaan lingkungan. Walaupun demikian, dalam pelaksanaannya masih kurang dipahami. Konsep tersebut menjembatani hubungan antara konservasi lingkungan dan kualitas hidup sosial-ekonomi tetapi tetap meninggalkan isu perdebatan mengenai bagaimana keseimbangan pemanfaatan yang berkelanjutan atau bagaimana nilai suatu lingkungan.

Pihak pengelola pantai seruni sangat menyadari pentingnya menjaga sustanbilitas lingkungan sehingga pengelola mengajak masyarakat setempat untuk senantiasa melakukan sosialisasi kepada pengunjung agar membuang sampah pada tempat yang disediakan. Sebagaimana yang diungkapkan pihak pengelolaan Objek Wisata Pantai Seruni bahwa :

“Industri apapun itu tidak pernah lepas dari yang namanya permasalahan lingkungan, kami tentu mempunyai taraf pembangunan yang sesuai dengan analisis dampak lingkungan sehingga arah pembangunan memperhatikan keseimbangan alam. Untuk itu kami mengajak masyarakat sekitar untuk senantiasa melakukan sosialisasi kepada pengunjung agar membuang sampah pada tempat yang telah ditentukan.” (Hasil wawancara dengan SF pada tanggal 20 Februari 2021).

Hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa dalam menjaga sustanbilitas lingkungan dalam kawasan pantai seruni pihak pengelola telah memiliki rancangan yang tidak akan merusak lingkungan. Selain itu pihak pengelola mengajak masyarakat sekitar untuk genar melakukan sosialisasi kepada pengunjung agar senantiasa menjaga kebersihan lingkungan.

Ecotourism mutlak memperhatikan pemeliharaan lingkungan alam (*conservation*), bukan sebaliknya mengubah keaslian alam sehingga mengganggu keseimbangan alam. Pemahaman pariwisata ekologi adalah untuk menyokong atau menopang keseimbangan hubungan antara manusia dengan lingkungan

alamnya. Kualifikasi aktivitas dalam *ecotourism* senantiasa berorientasi terhadap cara-cara pengembangan dan pemeliharaan keutuhan alam yang berkelanjutan.

Objek wisata pantai seruni merupakan wisata yang berbasis alam sehingga sustainabilitas dari lingkungan sangat diperhatikan baik oleh pemerintah dan pengelola. Keindahan pantai seruni merupakan hasil pembangunan reklamasi. Oleh sebab itu untuk menjaga keberlangsungan wisata pantai seruni sangat dibutuhkan perencanaan yang baik dan tidak merusak lingkungan sebagaimana hasil wawancara yang disampaikan oleh kepala dinas pariwisata Kabupaten Bantaeng bahwa :

“Kalau kita melihat wisata pantai seruni itu merupakan wisata berbasis alam dan buatan, jadi daya tariknya memang hasil bentukan alam dan manusia, jadi wajar jika baik pemerintah, pengelola dan masyarakat untuk senantiasa menjaganya. Dalam menjamin keberlangsungan lingkungan setiap agenda pembangunan di wisata pantai seruni tetap akan dirembukkan secara bersama baik dari pemerintah dan pengelola dengan melibatkan masyarakat sekitar.” (Hasil wawancara dengan SH pada tanggal 25 Februari 2021).

Hasil wawancara diatas dapat disimpulkan kehadiran wisata pantai seruni yang merupakan wisata berbasis alam sudah seharusnya pemerintah dan pengelola menjamin keberlangsungan lingkungan dikawasan tersebut. Salah satu bentuk upaya yang dilakukan adalah pemerintah dan pengelola beserta masyarakat selalu berunding ketika akan melaksanakan sebuah pembangunan dilokasi wisata tersebut.

Pertumbuhan ekonomi merupakan hal yang penting untuk dicapai. Namun dalam prosesnya, kelestarian lingkungan hidup tidak perlu dijadikan korban. Berbagai variabel, seperti sosial, ekonomi, dan lingkungan selalu memiliki keterkaitan satu dengan lainnya. Dengan demikian, lemahnya tingkat ekonomi

suatu negara juga dapat mempengaruhi rusaknya lingkungan sehingga akan menimbulkan dampak negatif bagi masyarakatnya.

Wisata pantai seruni berorientasi terhadap pembangunan wisata yang berkelanjutan dengan senantiasa memperhatikan kondisi lingkungan wisata, hadirnya pariwisata sebagai landasan untuk peningkatan ekonomi masyarakat harus sejalan dengan perbaikan kondisi lingkungan. Beberapa bukti nyata dari keseriusan pengelola agar kondisi alam wisata pantai seruni tetap terjaga dengan adanya beberapa tempat sampah yang disediakan bagi pengunjung. Sebagaimana yang diungkapkan oleh kepala pengelola pantai seruni bahwa :

“Sangat penting menjaga keberlanjutan suatu lingkungan dengan memperhatikan aspek pembangunan utamanya dalam lokasi wisata. Keberadaan tempat sampah, pemeliharaan pohon, serta tempat wisata yang hampir setiap hari dibersihkan merupakan bukti nyata bahwa dalam hal ini pihak pengelola sangat serius menjaga kondisi lingkungan di pantai seruni. Tidak perlu hanya sekedar kebijakan namun tidak dilaksanakan, tapi dengan bukti nyata seperti ini tentu kita bisa melihat bukti dari pentingnya menjaga keberlanjutan wisata pantai seruni.” (Hasil wawancara dengan SF pada tanggal 20 Februari 2021).

Hasil wawancara diatas dapat disimpulkan pengunjung melihat langsung beberapa bukti nyata terkait pembangunan wisata yang mengacu pada keberlanjutan lingkungan. Hal tersebut dapat dilihat dari usaha nyata pihak pengelola objek wisata pantai seruni dalam menjaga kebersihan di lokasi wisata.

Salah satu faktor yang harus dihadapi untuk mencapai *sustainability* lingkungan adalah bagaimana memperbaiki kehancuran lingkungan tanpa mengorbankan kebutuhan pembangunan ekonomi dan keadilan sosial. Oleh karena itu, pada dasarnya *Sustainable* lingkungan merupakan pembangunan yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat masa kini tanpa mengabaikan

kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka, sebagai suatu proses perubahan dimana pemanfaatan sumberdaya, arah investasi, orientasi pembangunan dan perubahan kelembagaan selalu dalam keseimbangan dan secara sinergis saling memperkuat potensi masa kini maupun masa mendatang untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi manusia (Budihardjo, 2010).

Arah kebijakan dari upaya menjaga keberlangsungan suatu lingkungan wisata tentu akan berdampak kepada masyarakat, salah satunya adalah tidak membangun tempat perdagangan yang permanen karena akan membutuhkan ruang. Berikut kutipan hasil wawancara pihak pengelolaan Objek Wisata Pantai Seruni bahwa :

“Pihak pengelola telah memberikan tempat masyarakat berdagang itu pada satu lokasi. Kami sempat mengusulkan agar dibuatkan tempat yang permanen tapi menurut pengelola itu akan memerlukan tempat lagi yang mengharuskan beberapa pohon ditebang, jadi seadanya saja sederhana tapi cukup untuk melakukan kegiatan perekonomian.” (Hasil wawancara dengan SF pada tanggal 20 Februari 2021).

Hasil wawancara diatas dapat dilihat bentuk keseriusan pengelola wisata pantai seruni adalah dengan membangun lokasi berdagang masyarakat hanya dengan menggunakan bangunan semi permanen. Hal tersebut dilakukan untuk mengurangi penebangan beberapa pohon jika harus menyediakan ruang bagi masyarakat dalam bentuk yang permanen.

Keberlanjutan lingkungan adalah sistem yang berkelanjutan secara lingkungan harus mampu memelihara sumberdaya yang stabil, menghindari eksploitasi sumberdaya alam dan fungsi penyerapan lingkungan. Konsep ini juga menyangkut pemeliharaan keanekaragaman hayati, stabilitas ruang udara, dan fungsi ekosistem lainnya yang tidak termasuk kategori sumber-sumber ekonomi.

Pembangunan objek wisata pantai seruni selalu memngarah kepada perhatian terhadap lingkungan salah satunya dengan melibatkan masyarakat dalam menjaga lingkungan wisata mulai dari membersihkan lingkungan dan menjaga kondisi tanaman yang ada disana. Berikut kutipan wawancara Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bantaeng bahwa :

“Kebersihan lingkungan selalu menjadi prioritas yang mengelola tempat wisata pantai seruni. Beberapa masyarakat bahkan diberikan pekerjaan hanya untuk menjaga kebersihan lingkungan dan memelihara beberapa tanaman yang ada disana. Biasanya ada beberpa pengunjung yang tidak bertanggung jawab merusak pohon dengan menulis nama mereka kebiasaan anak muda, sehingga disaat ramai para pekerja tadi sibuk memperhatikan masyarakat yang bisa saja merusak lingkungan.” (Hasil wawancara dengan SH pada tanggal 25 Februari 2021).

Hasil wawancara diatas disimpulkan bahwa pihak pengelola senantiasa melibatkan masyarakat secara langsung untuk menjaga kondisi lingkungan di wisata pantai seruni. Selain melibatkan masyarakat tersebut pihak pengelolapun meningkatkan perekonomian masyarakat dengan cara menggaji mereka hanya untuk memastikan kelestarian lingkungan.

Pada prinsip lingkungan dalam *Community Based Tourism* (CBT) dengan indikatornya menurut Suansri (2003), adalah terdapat pengembangan daya dukung spesies biologis (*carryng capacity area*), terdapat sistem pembuangan sampah yang ramah lingkungan, dan adanya kepedulian tentang pentingnya konservasi. Berdasarkan hasil observasi penulis dilapangan terkait upaya yang dilakukan pihak pemerintah dan pengelola dalam menjaga keberlanjutan lingkungan pada kawasan objek wisata pantai seruni adalah melalui pembahasan yang melibatkan pengelola, pemerintah dan masyarakat tentang prosedur pembangunan yang akan dilakukan sehingga tidak merusak lingkungan fisik dilokasi wisata. Selain itu

melibatkan masyarakat secara langsung untuk melakukan kontrol terhadap lingkungan wisata menjadi sangat penting terlebih masyarakat yang diberikan tugas tersebut mendapat gaji operasional dari pihak pengelola wisata pantai seruni. Masyarakat dan pengelola juga sudah memperhatikan masalah sampah dan untuk menambah wawasan tentang lingkungan, mereka menjalin kemitraan dengan lembaga dan komunitas lingkungan hidup.

5. Politik

Dalam sebuah pengembangan wisata berbasis masyarakat, perlu memperhatikan dimensi politik yang menjamin bahwa wisata itu sudah mengedepankan masyarakat. Dimensi politik disini untuk mengukur sebuah partisipasi masyarakat dan meningkatkan kualitas kelompok atau lembaga swadaya serta mampu menciptakan kepemimpinan yang efektif. Dalam upaya pengembangan yang berbasis masyarakat, dimensi politik memiliki indikator dalam mengukurnya yaitu menungkatkan partisipasi penduduk lokal, peningkatan komunitas atau masyarakat yang lebih luas, dan menjamin hak-hak dalam pengembangan sumber daya alam. Dimensi politik ini dirasa perlu untuk mengukur sebuah pariwisata berbasis masyarakat karena dalam dimensi politik terdapat indikator bahwa selain masyarakat atau komunikasi mampu menciptakan partisipasi, masyarakat juga mampu mengembangkan kemampuannya untuk berorganisasi dengan baik dalam sebuah pengembangan pariwisata.

Sebuah pariwisata yang berbasis masyarakat memang tidak akan pernah lepas dari sebuah partisipasi masyarakat. Masyarakat yang aktif merupakan

masyarakat yang mau ikut serta dalam perencanaan, pengelolaan, dan pengembangan sebuah pariwisata. Saat ini kawasan pariwisata banyak bermunculan dikalangan masyarakat. Hal ini juga disampaikan oleh kepala dinas pariwisata kabupaten Bantaeng, beliau mengatakan bahwa :

“Pada awalnya masyarakat sini kurang peduli terhadap pantai ini, dulunya pantai seruni panas dan gersang karena tidak adanya pepohonan, Setelah dibangun wisata pantai ini tanpa kita ajak mereka, ketika kami pemerintah mau menanam pohon masyarakat sekitar ikut berpartisipasi dalam menanam pohon dan menjaganya” (Hasil wawancara dengan SH pada tanggal 25 Februari 2021).

Dalam dimensi politik untuk meningkatkan partisipasi masyarakat pemerintah memberi kebijakan bahwa yang dapat berjualan hanya masyarakat asli Bantaeng sendiri sehingga masyarakat dapat berjualan di wisata Pantai Seruni dan bisa mendapatkan penghasilan. Kedua dalam meningkatkan partisipasi dengan memberitahu setiap ada kegiatan penanaman pohon kepada pemerintah setempat. Kemudian pemerintah setempat memberi informasi kepada setiap pedagang atau penjual yang ada di pantai seruni bahwa akan diadakan penanaman pohon. Dengan informasi tersebut bertujuan meningkatkan partisipasi masyarakat.

Dengan adanya kebijakan yang berjualan dan bekerja harus masyarakat asli Bantaeng ini juga meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan karena wisata ini pemerintah maka secara tidak langsung masyarakat mempunyai kewajiban untuk menjaga kebersihan di lingkungannya sendiri. Hal lain yaitu dengan semakin banyaknya pengunjung ke wisata Pantai seruni ini anak-anak muda semakin banyak yang ingin berkunjung. Jadi bisa dikatakan bahwa partisipasi masyarakat setelah adanya pariwisata ini meningkat.

Pariwisata yang berbasis masyarakat, peran masyarakat dan komunitas

sangatlah penting dalam pengelolaan dan pengembangan sebuah pariwisata. Hal ini didukung dengan adanya komunitas di dalam pariwisata tersebut. Dengan adanya sebuah komunitas yang sudah lama dibentuk diharapkan sektor pariwisata akan semakin meningkat. Dalam meningkatkan komunitas yang lebih luas ada beberapa hal yang harus dilakukan seperti yang telah disampaikan oleh pengelola Pantai Seruni. Beliau mengatakan bahwa kelompok laskar kebersihan ini belum atau masih kurang dalam segi pengetahuannya. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Kabuapten Bantaeng bahwa :

“Menurut saya kelompok ini sangat kurang pengetahuannya kelompok ini masih perlu didampingi, Biar mereka tau apa yang harusnya mereka lakukan agar wisata semakin di datangi banyak orang” (Hasil wawancara dengan ZA pada tanggal 26 Februari 2021).

Seperti yang dijelaskan bahwa Kabupaten Bantaeng adalah salah satu daerah yang memiliki pesisir pantai, Di daerah ini sebagian besar masyarakat menggantung kehidupannya pada laut, banyak dari mereka yang menjadi nelayan, petani rumput laut, berjualan di pasar, berkeliling menjual ikan dari hasil laut yang ada ini juga ada tambak pembuatan garam. Ini semua adalah hak yang dimiliki masyarakat pesisir pantai. Dengan dibangunnya wisata di Bantaeng tidak membuat masyarakat kehilangan haknya dalam mengolah Sumber Daya Alam, masyarakat masih tetap bisa mencari ikan di laut. Tempat wisata ini ada disebelah selatan tempat para nelayan memarkir kapalnya jadi wisata ini tidak menghalangi nelayan dalam memarkir kapalnya. Wisata ini juga tidak menghalangi masyarakat dalam melakukan penanaman rumput laut.

Pada prinsip politik dalam *Community Based Tourism* (CBT) dengan indikatornya menurut Suansri (2003), adalah terdapat upaya peningkatan

partisipasi dari penduduk lokal, terdapat upaya untuk meningkatkan kekuasaan komunitas yang lebih luas dan terdapat mekanisme yang menjamin hak-hak masyarakat lokal dalam pengelolaan SDA. Berdasarkan penelusuran melalui wawancara, dapat dikatakan bahwa pengelolaan wisata pantai seruni berjalan sesuai dengan prinsip politik dalam *Community Based Tourism* (CBT) yaitu sudah ada upaya untuk meningkatkan partisipasi penduduk lokal yang ditandai dengan pembagian wilayah usaha dikawasan wisata.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan terkait penelitian *Community-Based Tourism* (CBT) dalam Pengelolaan Pariwisata Pantai Seruni diukur melalui dimensi politik dalam *Community Based Tourism* (CBT) yaitu sudah ada upaya untuk meningkatkan partisipasi penduduk lokal yang ditandai dengan pembagian wilayah usaha dikawasan wisata pantai seruni. Dimensi sosial yaitu adanya peningkatan kebanggaan komunitas terlihat dengan adanya kebersamaan kelompok ini dengan masyarakat setempat dalam melayani pengunjung sebagai suatu masyarakat yang masih menjunjung tinggi semangat kekeluargaan dan kebersamaan. Mereka berusaha memberikan pelayanan yang terbaik bagi para pengunjung untuk memberikan kesan sebagai tuan rumah yang baik.

Pada dimensi ekonomi ini yang paling berdampak besar dalam pengembangan suatu wisata keberadaan Pantai Seruni pada kehidupan masyarakat berdampak positif bagi kehidupan ekonomi terutama dalam peningkatan pendapatan, memberi peluang pekerjaan, sekaligus sebagai alat untuk mengembangkan usaha dan pada akhirnya mampu merubah taraf/kesejahteraan hidup masyarakat dan kelak diharapkan dapat menjadi sumber mata pencaharian yang lebih baik. kemudian dimensi lingkungan dalam pengembangan di wisata menjamin sustainabilitas lingkungan adalah melalui pembahasan yang melibatkan pengelola, pemerintah dan masyarakat tentang prosedur pembangunan yang akan dilakukan sehingga tidak merusak lingkungan fisik dilokasi wisata.

B. Saran

1. Meningkatkan keterlibatan pemerintah daerah dan pihak swasta dalam implementasi program pemberdayaan masyarakat sekitar wisata karena masyarakat termasuk masyarakat yang kurang berdaya dalam segala hal, karena pendidikan, ekonomi dan status sosialnya, sehingga perlu melakukan program pendampingan.
2. Diharapkan pemerintah daerah dan pengelola wisata Pantai Seruni agar senantiasa membuka ruang kepada masyarakat agar dapat berdaya sehingga masyarakat dapat hidup mandiri.
3. Kepada para wistawan agar sekiranya membangun kesadaran untuk senantiasa menjaga kebersihan lokasi objek wisata pantai Seruni agar keberadaan lokasi wisata tersebut juga dapat dinikmati generasi mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abiradin Rosidi dkk. (2013). *Reinventing Local Government, Demokrasi dan Reformasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Cv. Andi Offset.
- Alfitri. (2011). *Community Development Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Baskoro & Rukendi, C. (2008). *Membangun Kota Pariwisata Berbasis Komunitas: Suatu Kajian Teoritis*. *Jurnal Kepariwisata Indonesia*, Vol III (1):37-50.
- Dewi, A. Oktami (2013). *Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Objek Wisata Bahari di Pulau Kapoposang Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan*. Makassar: Universitas Hasanuddin.
- Dhimas, S. N. (2018). *Community Based Tourism Tantangan Dusun Nglepen dalam Pengembangan Desa Wisata*. *Jurnal Pariwisata*. Vol.5 No 1.
- Dwiyanto, Agus. (2015). *Manajemen Pelayanan Publik: Peduli, Inklusif dan Kolaboratif*. Yogyakarta: UGM Press.
- Endah, Sri Nurhidayati. (2007). *Community Based Tourism (CBT) Sebagai Pendekatan Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan*. *Jurnal Pariwisata UNAIR*. 20 No 3
- Garrod, Brain. (2001). *Local Partisipation in the Planning and Management of EcoTourism A Resived Model Approach*. University of the West of England. Bristol.
- Hetifah Sj. (2009). *Inovasi, Partisipasi dan Good Governance*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- Keban, Jeremias T. (2008). *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik : Konsep, Teori dan Isu*. Yogyakarta : Penerbit Gava Media.
- Kurniawan, Teguh. (2007). *Pergeseran, Paradigma Administrasi Publik; Dari Perilaku Model Klasik Dan NPM Ke Good Governance*. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*. No. 23A/Dikti/KEP/2004. ISSN.141-948X, Vol. 7. Hal. 16-17
- Mardikanto, Totok, Poerwoko Soebiato. (2012). *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Marpaung. (2007). *Pengetahuan Kepariwisata*. Bandung. Alfabeta.
- Marysya, P., & Amanah, S. (2018). *Tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan wisata berbasis potensi desa di Kampung Wisata Situ Gede Bogor*. *Jurnal Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat [JSKPM]*, 2(1), 59-70.

Wrihatnolo, Randy R. Riant Nugroho Dwijowijoto. (2007). *Manajemen Pemberdayaan, Sebuah Pengantar dan Panduan Untuk Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo,

Yahya, Yohanes. (2006). *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta : Graha Ilmu

